



# **PENGUATAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN EKSTREM Kabupaten Mimika**

Oleh: Aditya Hera Nurmoko,S.IP, M.M.



6 Oktober 2025

Hotel Grand Tembaga, Kabupaten Mimika





Pendahuluan

Kebijakan Global Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan Regional Penanggulangan Kemiskinan

Analisis Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

Analisis SWOT Kemiskinan Kabupaten Mimika

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

# Vicious Circle of Poverty

## Lingkaran Setan Kemiskinan



# Pendahuluan

## Latar Belakang



Kemiskinan merupakan **permasalahan multidimensi** dan memerlukan upaya **penanggulangan** secara **komprehensif, holistik, dan terintegratif**.



Tren **penurunan kemiskinan** secara nasional **mengalami perlambatan** ( $< 0,5\%$ ). **Target kemiskinan ekstrem 2026 sebesar 0%** dan **kemiskinan sebesar 4,5% pada tahun 2029**.



Bank Dunia menetapkan standar kemiskinan ekstrem sebesar **\$2,15 PPP**. Untuk mencapai target, perlu percepatan **strategi, kolaborasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan**.



Berdasarkan data BPS, **Kabupaten Mimika** memiliki persentase penduduk miskin **sebesar 14,18 %** atau sebanyak **32,09 ribu** penduduk miskin pada tahun 2024.



Berdasarkan DTSEN, **Kabupaten Mimika** memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem (desil 1) sebanyak **12.316 keluarga** dan **43.557 individu** per 1 september 2025.



Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan bidang sosial mempunyai **sub bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial**.



Saat ini merupakan momentum dalam perbaikan dan percepatan upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Mimika, **karena dalam periode penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah**.

## Maksud & Tujuan

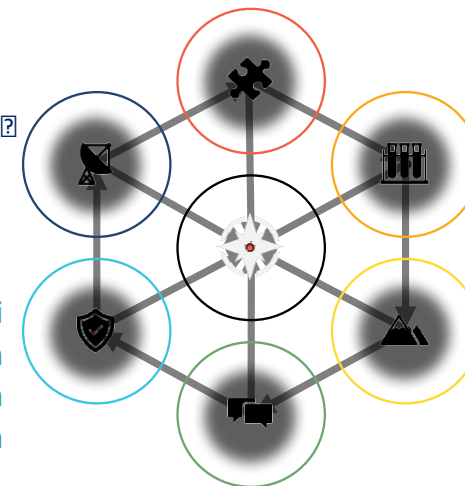


Menyediakan **rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan** di Kabupaten Mimika secara **holistik, integratif, dan berbasis spasial**.

Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas/Instansi/Lembaga terkait penanggulangan kemiskinan

Merumuskan langkah-langkah dan strategi integrasi (*crosscutting*) dalam upaya penanggulangan kemiskinan

Menyusun kerangka/model monitoring dan evaluasi

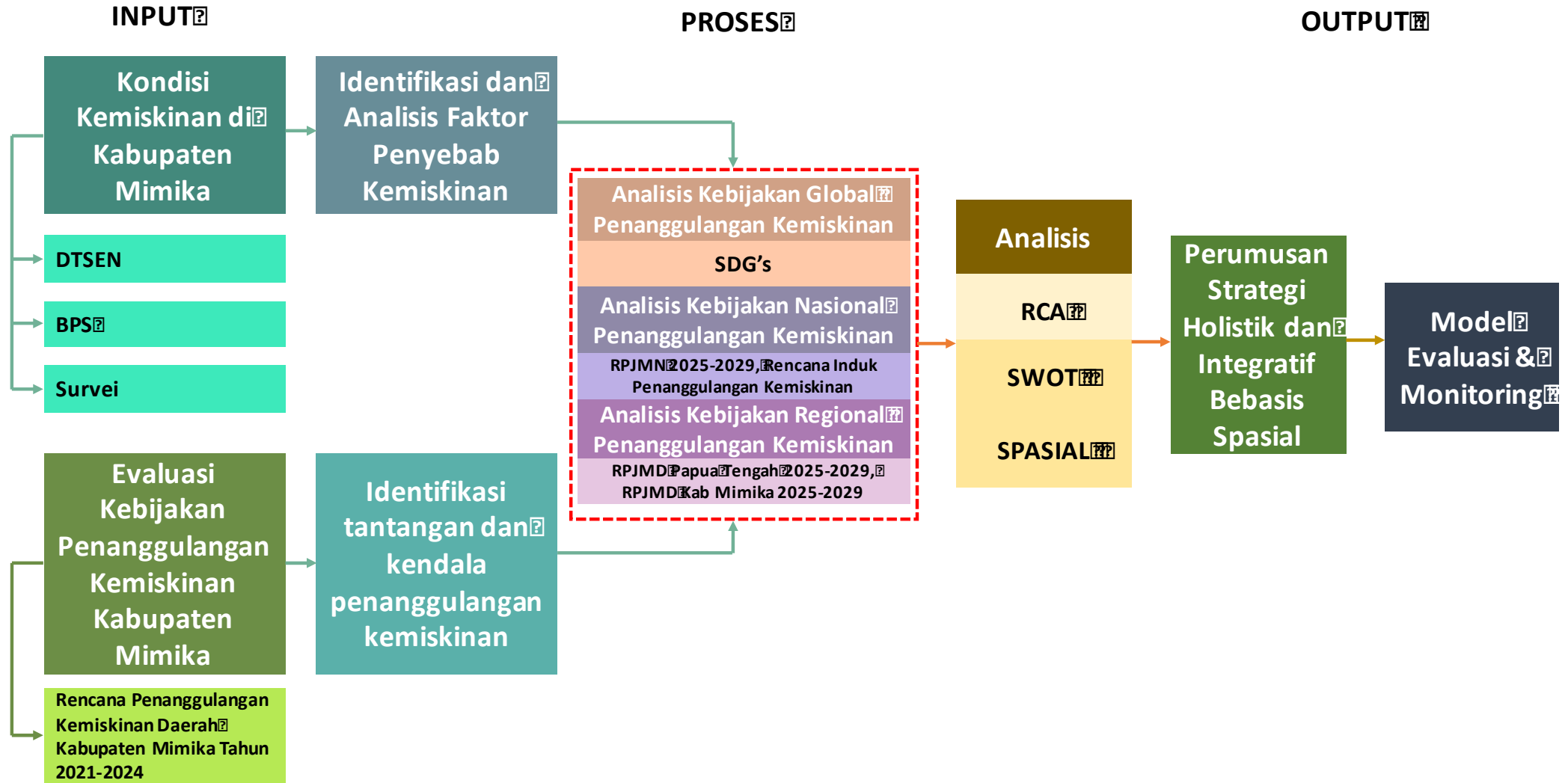


Menggambarkan secara menyeluruh kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

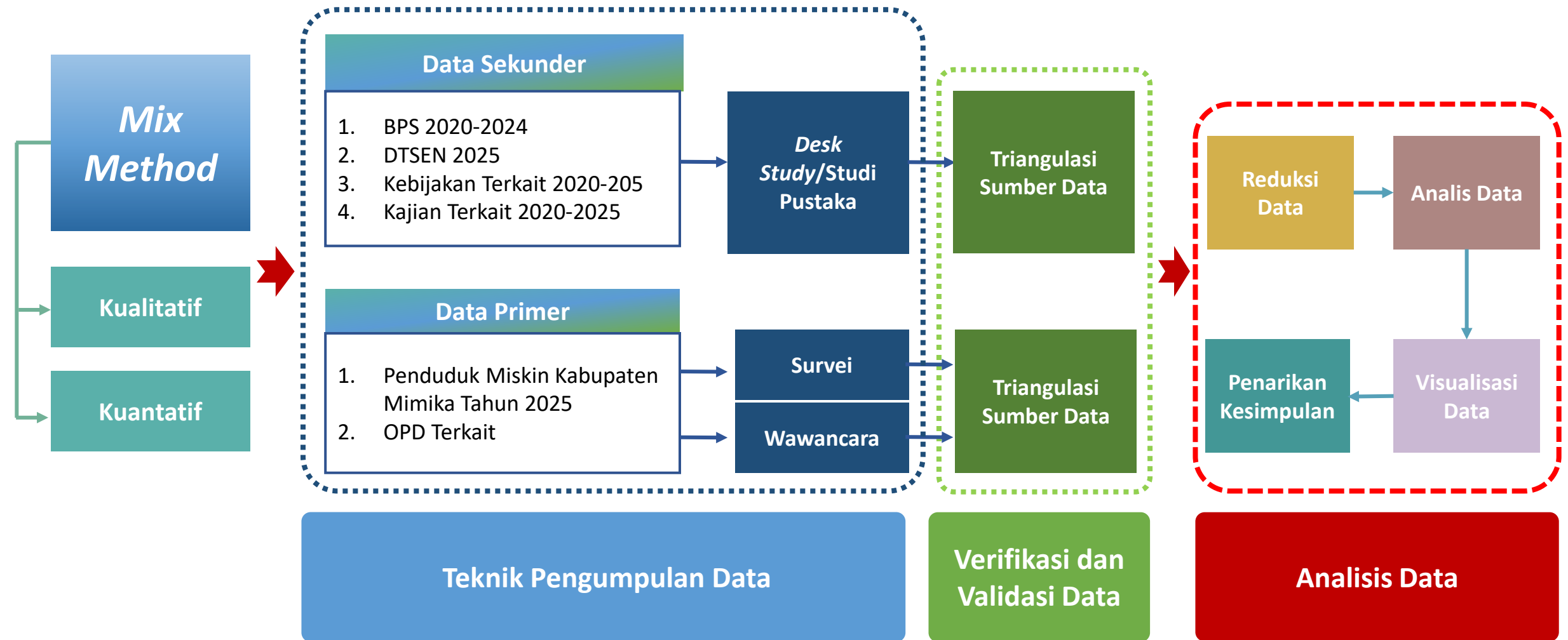
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

Menyusun rekomendasi dan laporan hasil kajian sebagai bahan pijakan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang efektif

# Kerangka Berpikir



# Metode Penelitian



# Regulatory Mapping

## Penanggulangan Kemiskinan

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Undang-Undang                                                                       | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial                                                                                                | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin                                                                                                                  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah                                                          |
| Peraturan Pemerintah                                                                | Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                                                                         | Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin                                                                                |                                                                                                                      |
| Peraturan Presiden                                                                  | Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041                                                     | Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan                                                                                 | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029                                                       |
| Intruksi Presiden                                                                   | Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem                                                                        | Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem                                         |                                                                                                                      |
| Peraturan Menteri                                                                   | Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial                                             | Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelerasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota | Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional |
| Peraturan Daerah <sup>?</sup><br>Provinsi Papua <sup>?</sup><br>Tengah <sup>?</sup> | Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2029                                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Keputusan Gubernur Provinsi Papua <sup>?</sup> Tengah <sup>?</sup>                  | Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Papua Tengah tahun 2024 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Peraturan Daerah <sup>?</sup><br>Kabupaten Mimika                                   | Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2021-2024                                        | Peraturan Daerah Nomor... Tahun... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika tahun 2025-2029                                                  |                                                                                                                      |

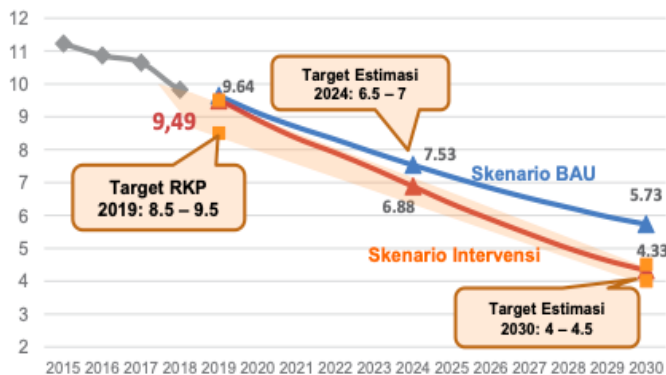


## Peta Jalan SDG's Indonesia 2030



### TUJUAN 1 MENGHAPUS KEMISKINAN

#### 1.2.1\* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional



**5.73%** Tingkat kemiskinan tahun 2030 dengan skenario *business-as-usual*

**4.33%** Tingkat kemiskinan tahun 2030 dengan skenario intervensi berada pada kisaran **4-4.5%**

Metode proyeksi perhitungan Bank Dunia, asumsi pertumbuhan, pertumbuhan per desil, inflasi, dan populasi.

**Berhasil menurunkan tingkat kemiskinan ke angka 1-digit, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar**

Dalam menghapuskan tingkat kemiskinan ekstrem secara menyeluruh

Tingkat kemiskinan yang sudah rendah membuat kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan di mana kelompok termiskin lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena berada dalam keadaan yang jauh lebih rumit dari sekadar ketidakmampuan finansial seperti: tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik.

- Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah **penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia**. kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kawasan barat Indonesia (KBI). Provinsi Papua, misalnya, akan memerlukan intervensi kebijakan khusus agar efektif. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam. Saat bencana terjadi, tingkat kemiskinan berpotensi untuk meningkat dengan tajam.
- Tidak hanya itu, bersamaan dengan menurunkan jumlah orang miskin, kita perlu memastikan bahwa orang-orang yang berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak jatuh ke bawah garis kemiskinan. Maka itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas makroekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat mikro, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

| Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan nasional |          |            |           |
|--------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Tahun                                                  | Baseline | Intervensi | Target    |
| 2015                                                   | 11.22    | 11.22      | -         |
| 2019                                                   | 9.64     | 9.49       | 8.5 – 9.5 |
| 2024                                                   | 7.53     | 6.88       | 6.5 – 7.0 |
| 2030                                                   | 5.73     | 4.33       | 4 – 4.5   |



| Arah Kebijakan | Strategi | Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | <ul style="list-style-type: none"><li>Pemantapan jaminan sosial yang komprehensif dan memadai bagi penduduk miskin dan rentan.</li><li>Integrasi bantuan dan subsidi tepat sasaran yang mendorong peningkatan keuangan inklusif.</li><li>Pengembangan kualitas layanan dasar, melalui tata kelola SPM yang handal dan responsif.</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Penguatan Tim Koordinasi Daerah untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pencapaian SDGs.</li><li>Pemantapan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) yang terhubung dengan basis data kependudukan dan JKN</li><li>Pengembangan sistem data dan layanan satu pintu untuk sinergi program-program pusat dan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.</li><li>Peningkatan kapasitas Pemda dalam analisis, perencanaan dan penganggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong kolaborasi peningkatan ekonomi keluarga melalui pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring.</li><li>Peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan (a.l. perhitungan sosial dan Reforma Agraria).</li><li>Pemanfaatan teknologi tepat guna dan inovasi untuk mengembangkan nilai tambah usaha produktif masyarakat.</li><li>Pengembangan usaha sosial rintisan (social entrepreneurs) untuk mengentaskan permasalahan sosial masyarakat</li></ul> |
| Arah Kebijakan | Strategi | Perlindungan sosial dan pelayanan dasar yang berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penguatan tata kelola dan kelembagaan yang sinergis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |          | <ul style="list-style-type: none"><li>Pemantapan bantuan sosial yang terintegrasi dengan keuangan inklusif, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.</li><li>Pengembangan inovasi berbasis teknologi dalam layanan dasar di seluruh pelosok Indonesia.</li><li>Sinergi dan kerjasama pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, LSM) dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan.</li><li>Pengembangan strategi replikasi di daerah-daerah sulit untuk mendorong pengurangan kemiskinan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Peningkatan kapasitas masyarakat rentan dan menengah melalui berbagai pelatihan, pendampingan memulai usaha, dan mentoring.</li><li>Menjamin pemodal dan pasar bagi usaha ekonomi lokal.</li><li>Pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat.</li><li>Menciptakan iklim usaha yang harmonis dengan didukung kebijakan yang adil dan merata.</li></ul>                                                                                                                                                      |



## Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Konomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### 8 Misi Asta Cita

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga Kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan;
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

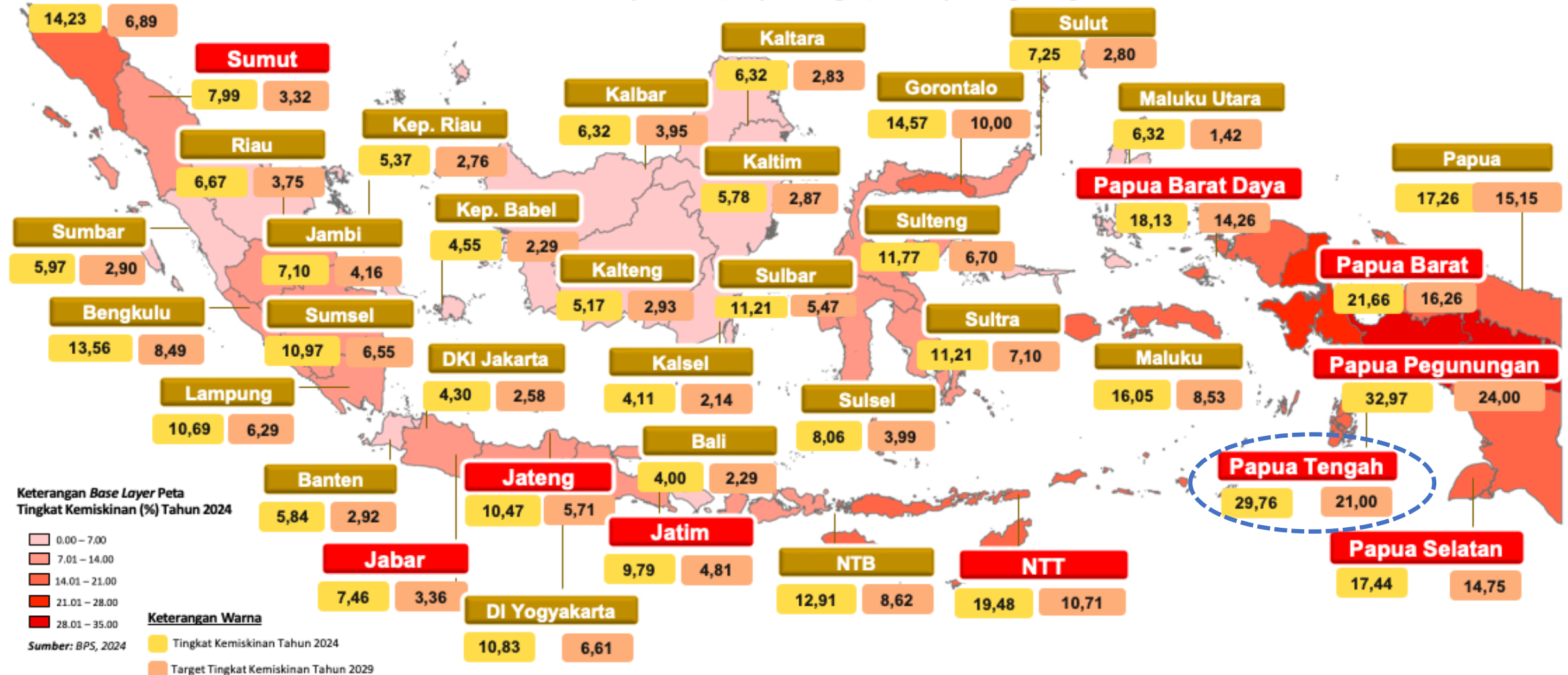
### 8 Program Hasil Terbaik Cepat

- |                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mencapai swasembada pangan                                           | 11. Menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan    |
| 2. Memberantas kemiskinan                                               | 12. Memberantas narkoba                                                          |
| 3. Memberantas korupsi                                                  | 13. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan Pembangunan IKN          |
| 4. Meningkatkan layanan Kesehatan dan obat untuk rakyat                 | 14. Memperkuat pendidikan, sains dan teknologi                                   |
| 5. Memperkuat pertahanan negara                                         | 15. Melakukan reformasi huku, politik dan birokrasi                              |
| 6. Mencapai swasembada air                                              | 16. Menjamin pelestarian lingkungan hidup                                        |
| 7. Mencapai swasembada energi                                           | 17. Melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga |
| 8. Menyempurnakan penerimaan keuangan negara                            |                                                                                  |
| 9. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani |                                                                                  |
| 10. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi                          |                                                                                  |

### 17 Program Prioritas

# Kebijakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan Target RPJMN 2029

**10 Provinsi Prioritas: Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.**



# Tantangan & Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional



Sumber Data: SUSENAS 2023 & 2024, diolah Dit.PKPM Bappenas



### Subtansi Rencana Induk

Penyelarasan data kemiskinan dari berbagai K/L dan Pemerintah Daerah

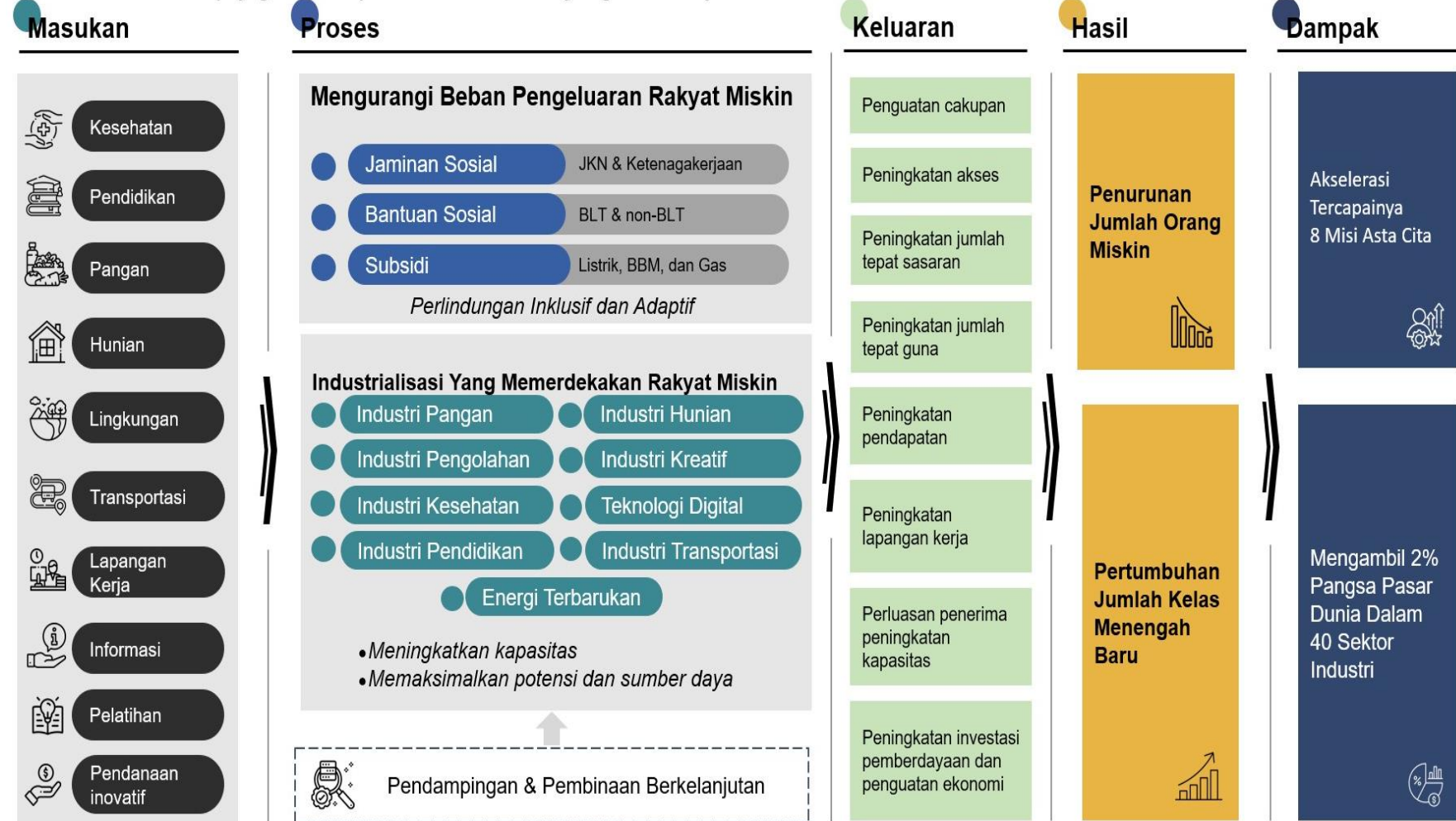
Penyusunan postur dan standar acuan kemiskinan nasional

Konsolidasi pengembangan ekosistem kewirausahaan sosial dan penciptaan lapangan kerja untuk penduduk miskin

Peluncuran kartu wirausaha untuk percetakan wirausaha baru dari penduduk miskin

Pengembangan program abadi dana kemiskinan

Memenuhi perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi yang inklusif, sehingga masyarakat tidak hanya diberdayakan secara finansial tetapi juga mendapatkan kemandirian yang berkelanjutan.



**Wilayah Adat Laa Pago**

- Karakteristik geografis: pegunungan tinggi
- Potensi wilayah: kopi, padi, sagu, ubi kayu, ubi jalar, peternakan, dan pariwisata

- Karakteristik geografis: dataran rendah, pegunungan, dan pesisir
- Potensi wilayah: kacang hijau, jagung, padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, sagu, kopi, kelapa, kelapa sawit, kakao, hortikultura, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata



## Wilayah Adat Anim Ha

- Karakteristik geografis: pantai, rawa, dan dataran rendah
- Potensi wilayah: kelapa, sagu, ubi kayu, ubi jalar, padi, perikanan, dan pariwisata

**Potensi Pengembangan Kabupaten Mimika adalah: 1) Tanaman Pangan Sagu; 2) Tanaman Pangan Ubi Kayu; 3) Tanaman Pangan Ubi Jalar; dan 4) Perikanan**

**Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua manargetkan tingkat kemiskinan sebesar pada tahun 2042**

**5,81 – 2,82** personen

# Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang selaras dengan RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Arah kebijakan tersebut meliputi:

1

2

3

4

**Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Dasar**

Memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yang berkualitas.

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap permodalan.

**Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

**Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan**

Memperluas cakupan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi masyarakat miskin dan rentan, termasuk melalui program bantuan sosial dan kartu kesejahteraan.

## Program - Program Inovatif

Adapun program - program inovasi pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Tengah:

### 1. Mengurangi Beban Masyarakat

- **Fasilitasi Akses Pendidikan:** Penyediaan bantuan berupa Biaya Personil dan perlengkapan Peserta Didik guna menunjang proses belajar dan meringankan beban orang tua
- **Fasilitasi Kesehatan:** Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat serta pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat
- **Pemberian Kartu Sistem Layanan Efektif dan Holistik untuk Akses Kesehatan Tanpa biaya (SEHAT) :** komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif, menyeluruh, dan gratis bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah.

### 2. Peningkatan Pendapatan

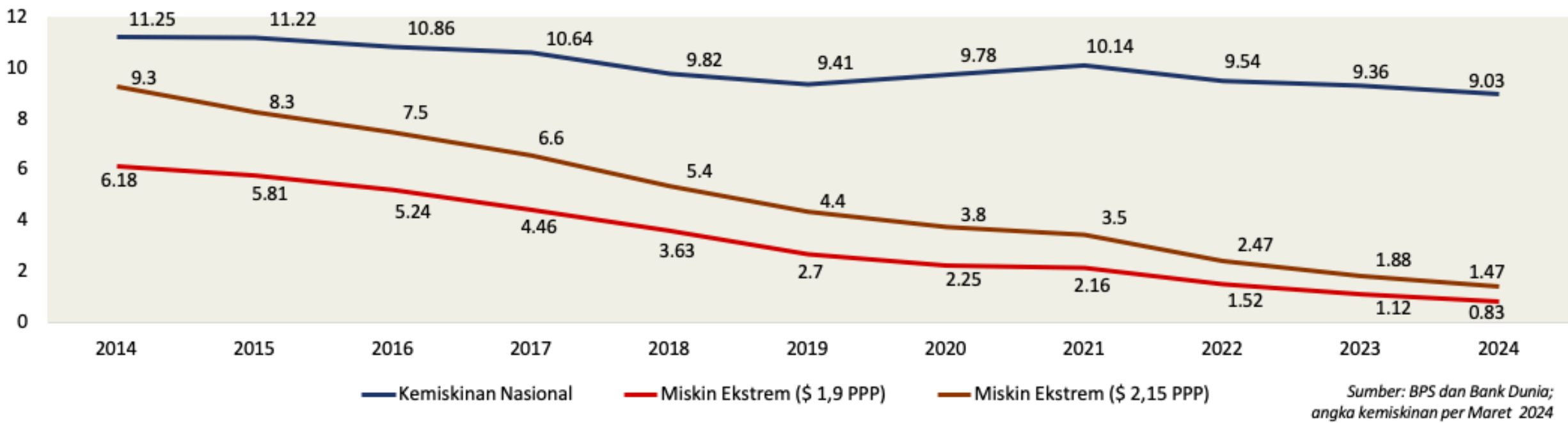
- **Pengembangan UMKM Lokal:** Memberikan pelatihan dan akses permodalan kepada pelaku UMKM, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Program ini akan didukung oleh **Balai Latihan dan Vokasi** yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan wirausaha.
- **Program Kartu Usaha Afirmatif:** Memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki potensi wirausaha. Program ini diintegrasikan dengan Kartu Kesejahteraan Sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

### 3. Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pendukung

- **Pembangunan Jalan dan Jembatan:** Memprioritaskan **pembangunan infrastruktur transportasi** yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Program ini akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses pasar bagi produk lokal.
- **Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi:** Membangun sarana **air bersih dan sanitasi** di daerah-daerah yang masih kekurangan akses air bersih, terutama di wilayah pedesaan.
- **Elektrifikasi Pedesaan:** Melanjutkan program **elektrifikasi desa** untuk memastikan seluruh wilayah di Papua Tengah memiliki akses listrik yang memadai.
- **Pembangunan Sarana Transportasi:** melanjutkan **Pembangunan Bandara Perintis** di daerah - daerah yang sulit dijangkau
- **Peningkatan Sarana Komunikasi:** Berupa bantuan jaringan **akses internet secara gratis**



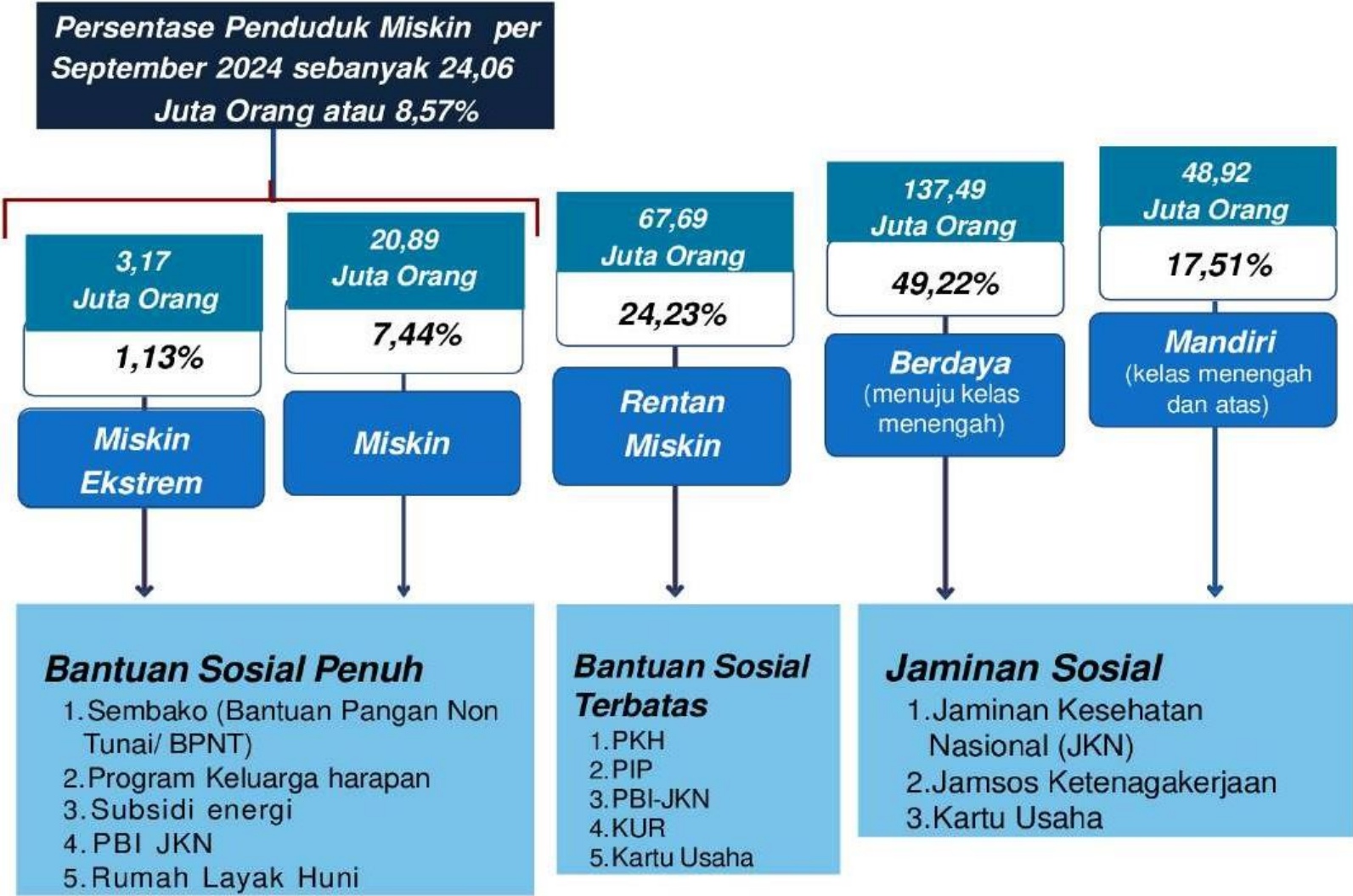
# Profil Kemiskinan Nasional 2014-2024



- Realisasi angka kemiskinan pada September 2024 sebesar 24,06 juta jiwa atau 8,57 persen.
- Untuk mencapai target RKP 2025 sebesar 7–8 persen, minimal dientaskan 1,7 juta penduduk miskin.
- Kemiskinan ekstrem sesuai penyesuaian ambang batas menjadi 2,15 USD PPP, ditargetkan di bawah 1% tahun 2026.

Target RPJPN Indonesia Emas 2045

- Tingkat Kemiskinan : 0,5 – 0,8
- Tingkat Rasio Gini : 0,290 – 0,320
- Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,0

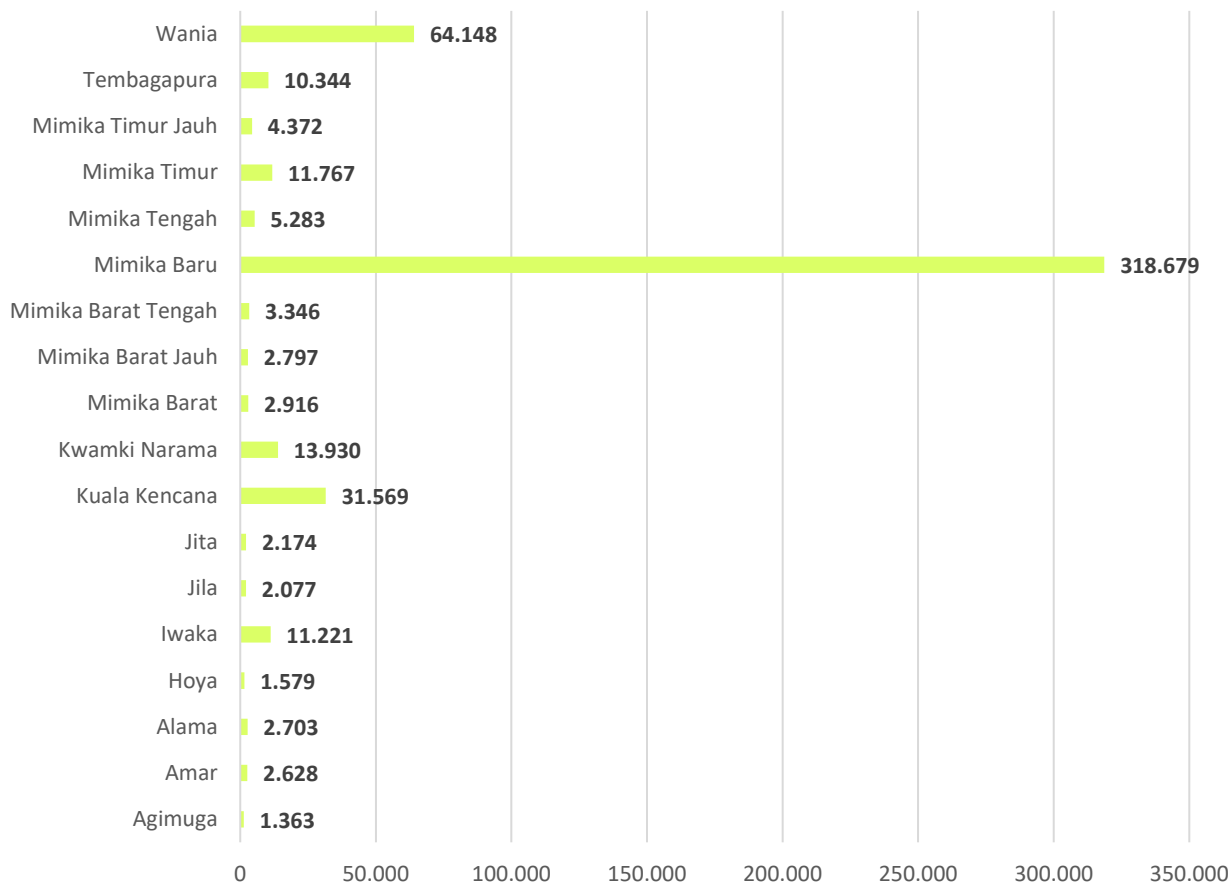


**PROFIL KEMISKINAN EKSTREM**

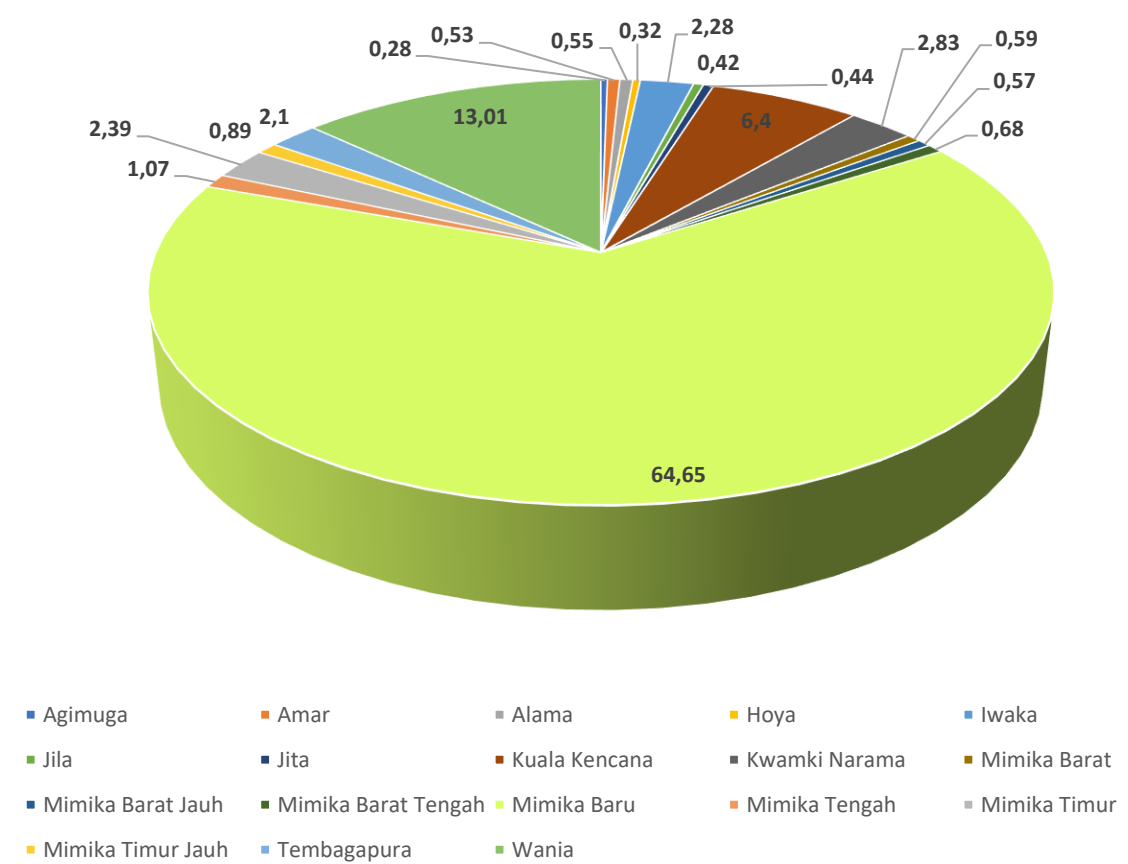
- Sebanyak **40,66%** kepala rumah tangga miskin ekstrem **berusia 30-49 tahun** dan **25,18% Lansia**.
- Sebanyak **74,51%** kepala rumah tangga miskin ekstrem **berpendidikan SD ke bawah**.
- Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem **53,6% bekerja di sektor pertanian**.
- Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem **59,54%** bekerja di sektor informal.
- Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrem **46,26%** bekerja di sektor informal pertanian.
- Kemiskinan ekstrem terdapat **berada di desa**.

Sumber: Susenas BPS September 2024

# Profil Penduduk Kabupaten Mimika



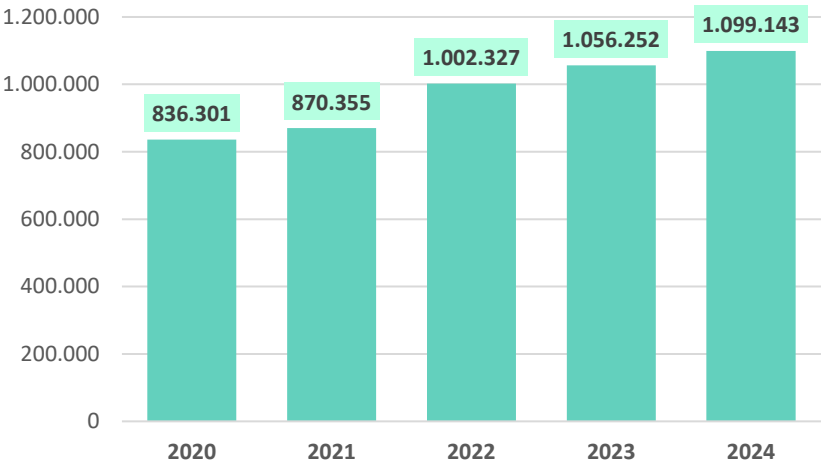
Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika 2024



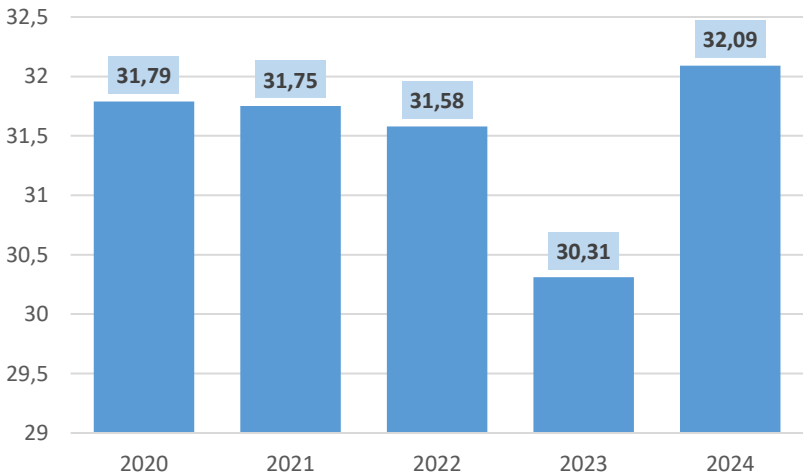
Persentase Sebaran Penduduk Kabupaten Mimika 2024

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

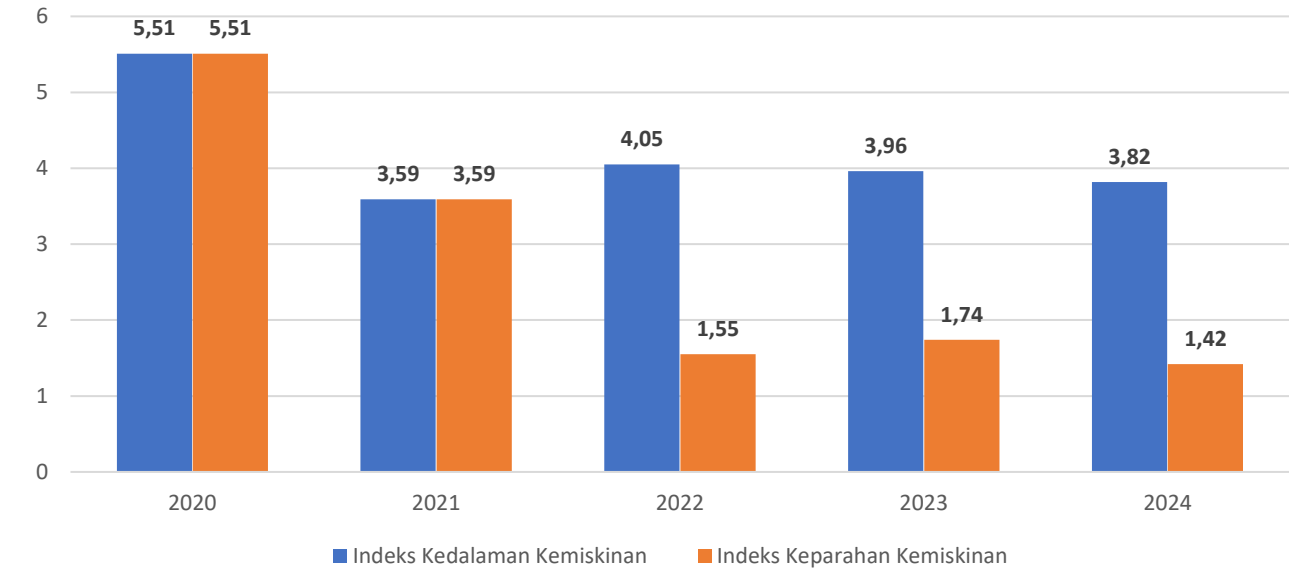
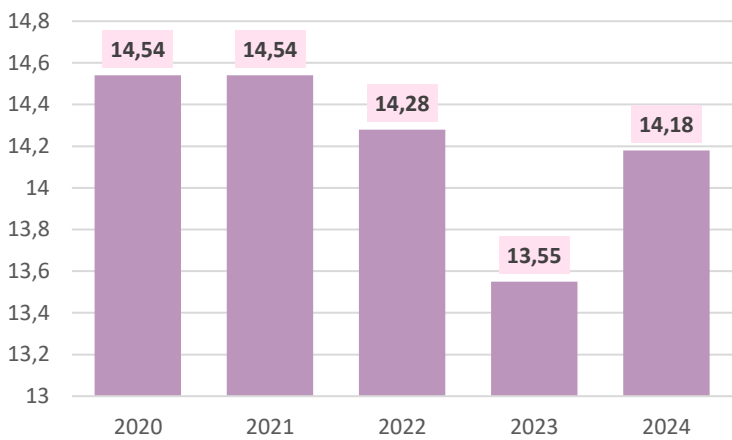
Garis Kemiskinan



Jumlah Penduduk Miskin



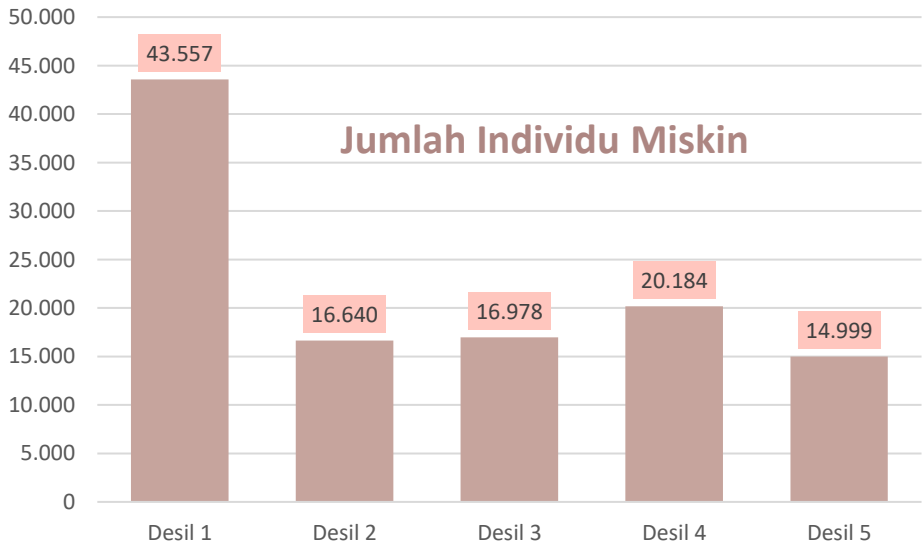
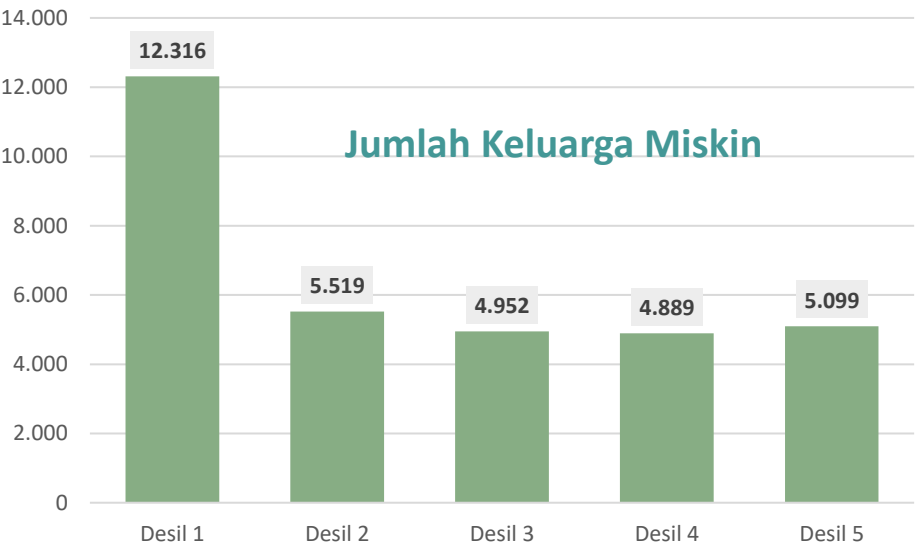
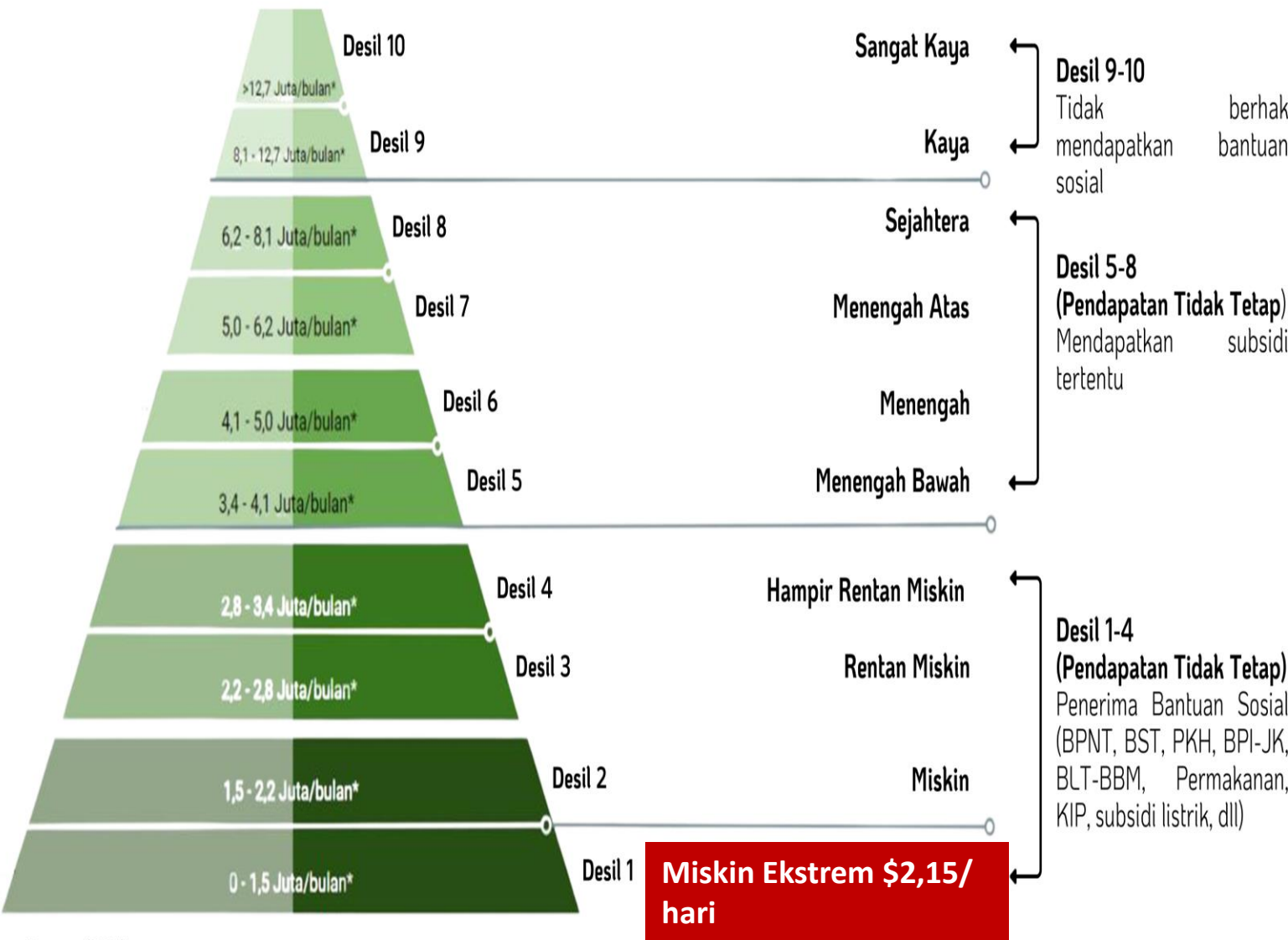
Persentase Penduduk Miskin



**14,18** persen penduduk miskin tahun 2024  
**32,09** ribu jiwa penduduk miskin tahun 2024  
**3,82** indeks kedalaman kemiskinan tahun 2024  
**1,42** indeks keparahan kemiskinan tahun 2024

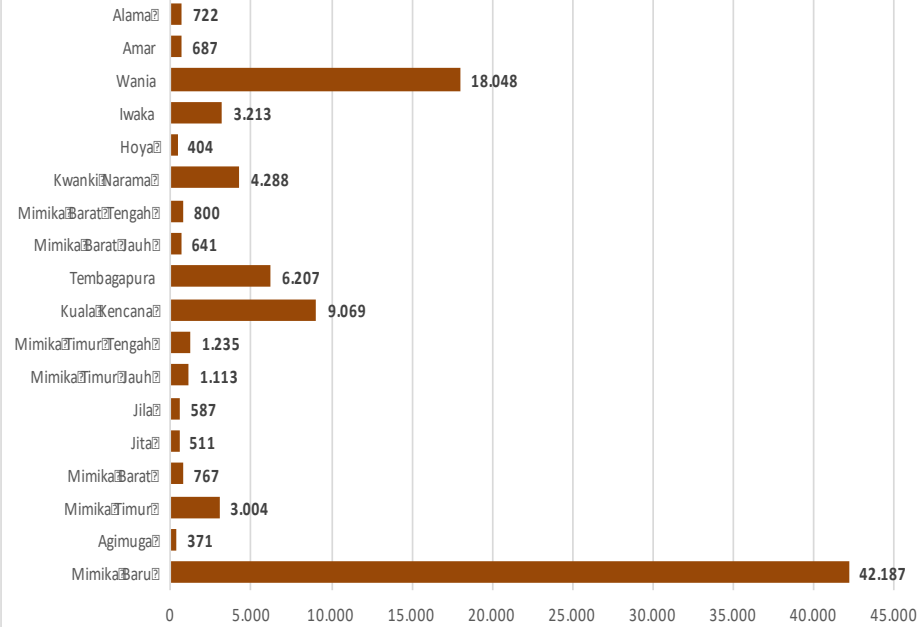
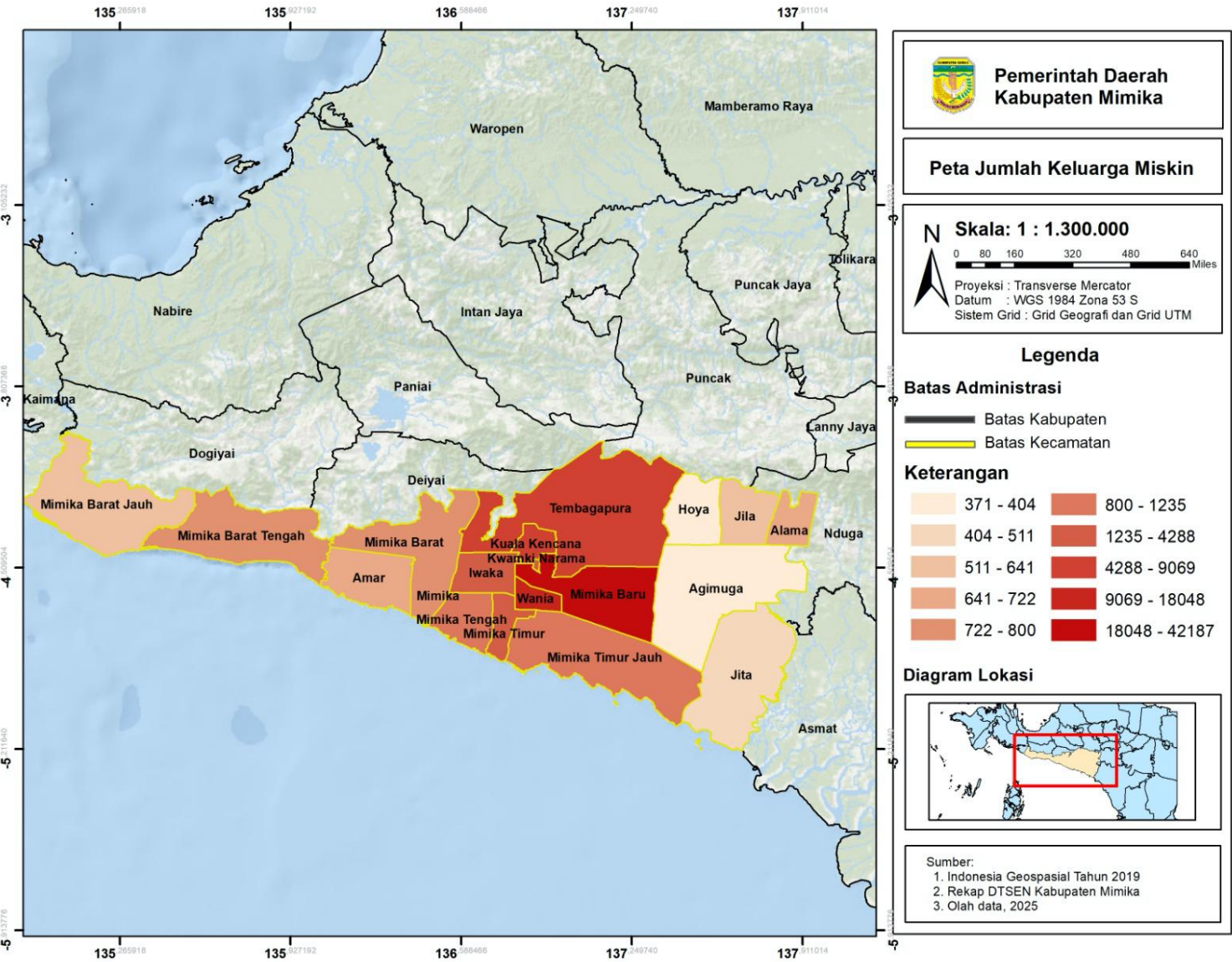
BPS Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika Per Desil



# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025

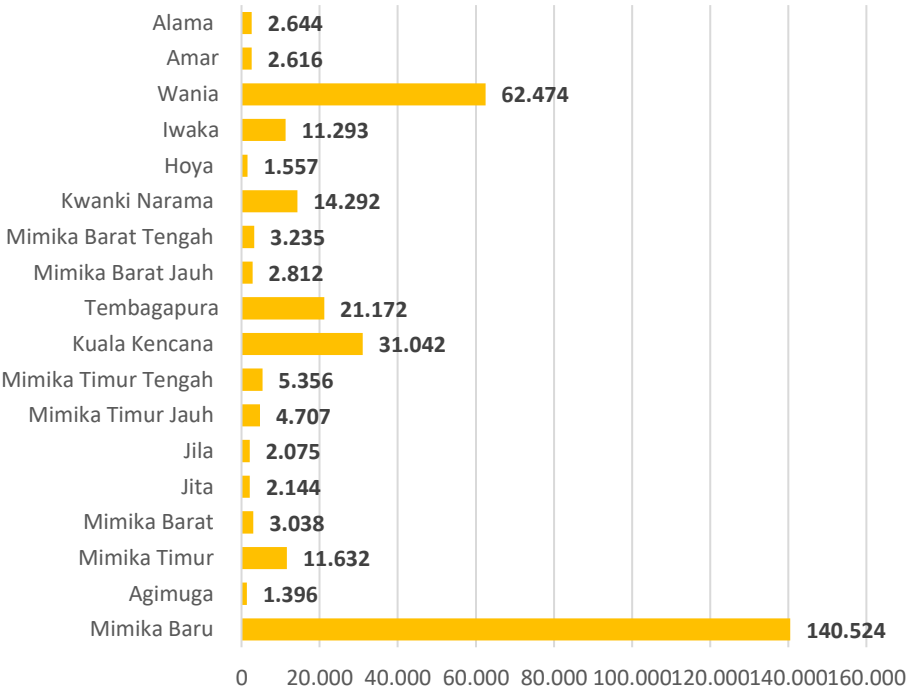
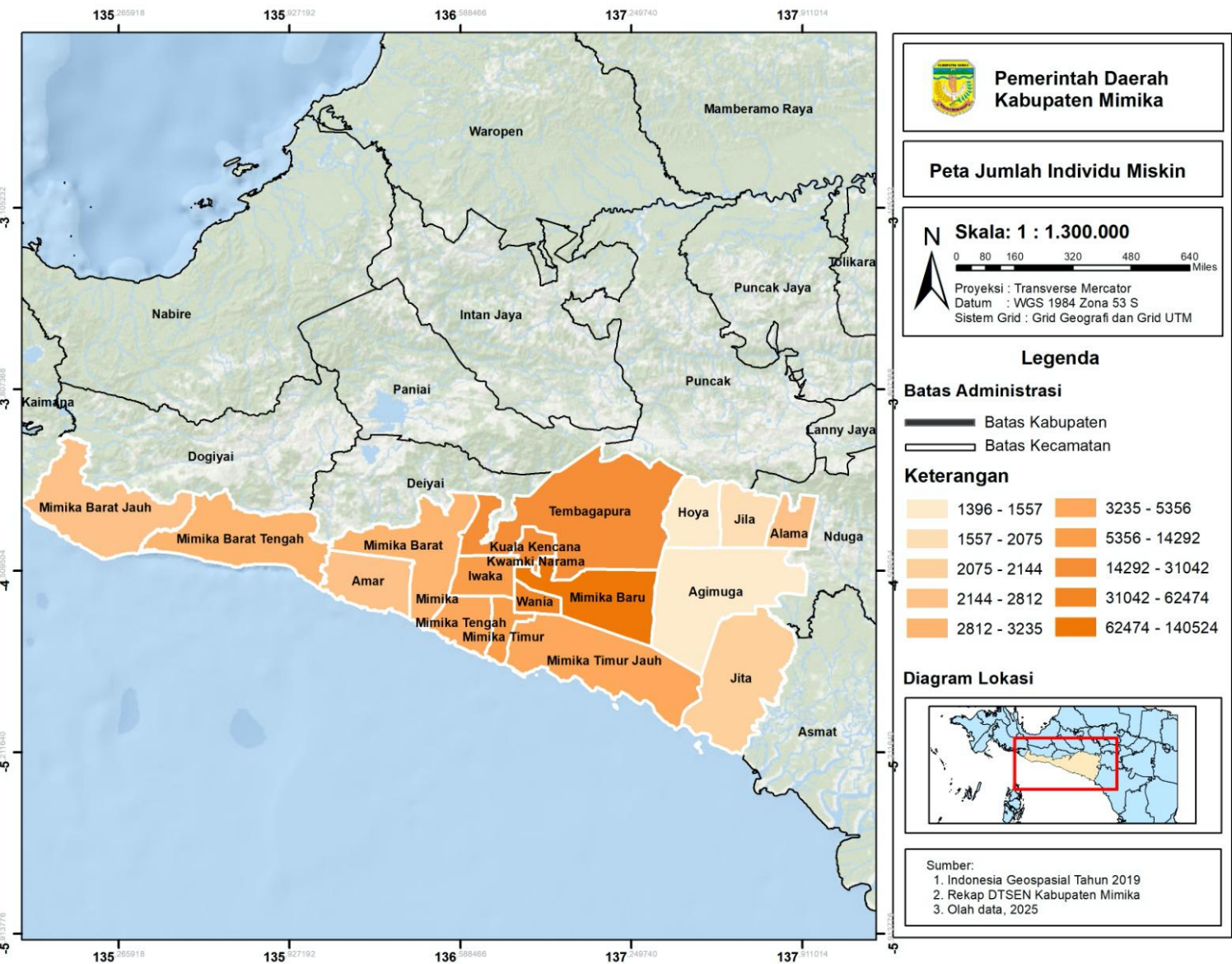


Jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **42.187**; Distrik **Wania** sebanyak **18.048**; dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **9.069**.

*DTSEN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025

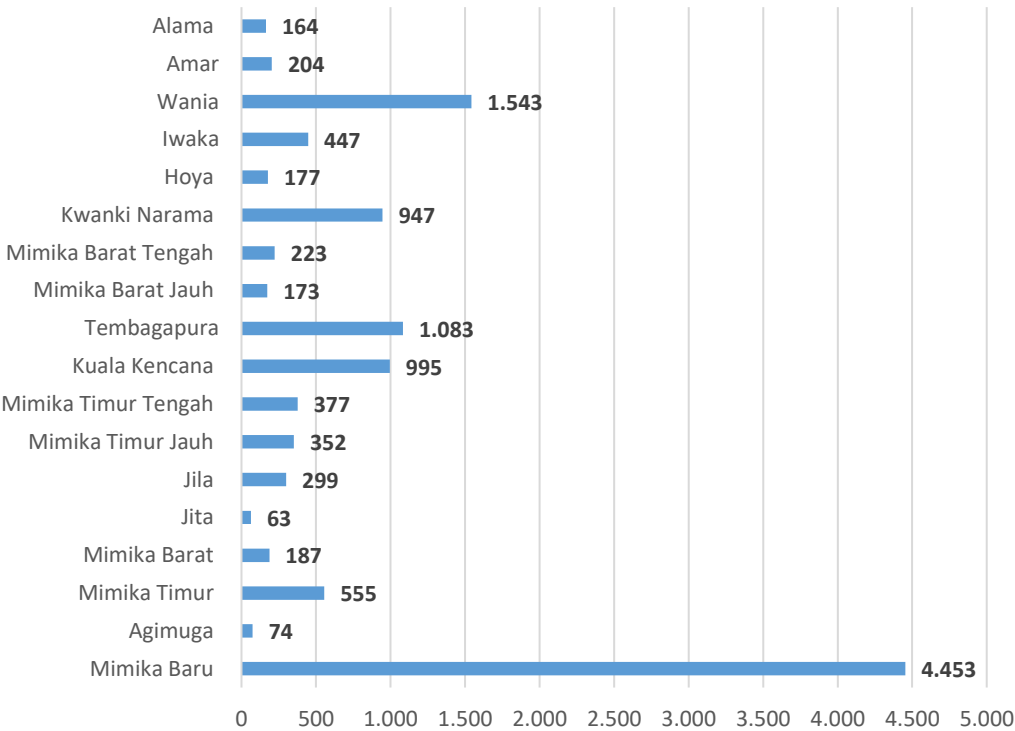
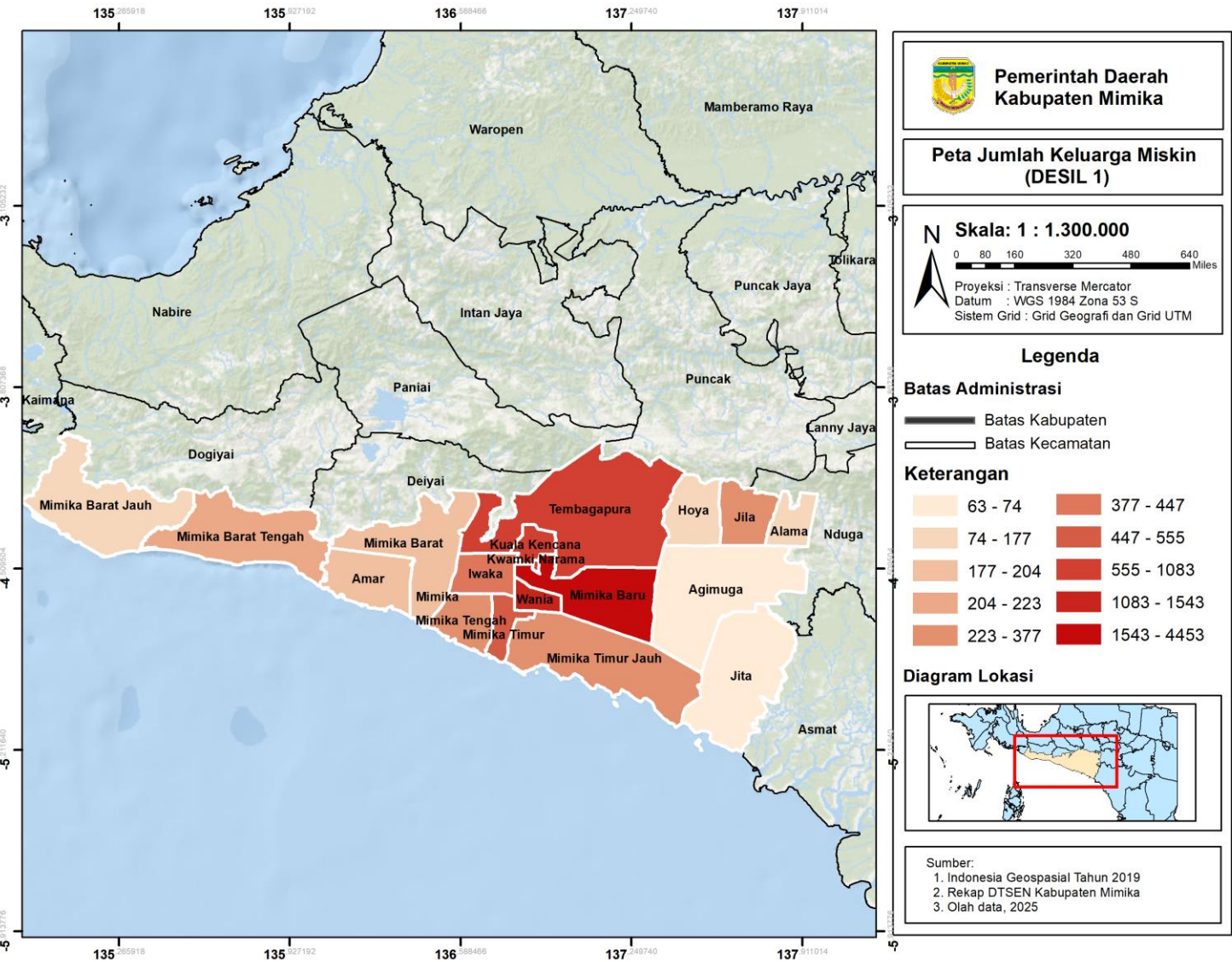


Jumlah keluarga miskin terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **140.524**; Distrik **Wania** sebanyak **62.474**; dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **31.042**

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025 (Desil I)

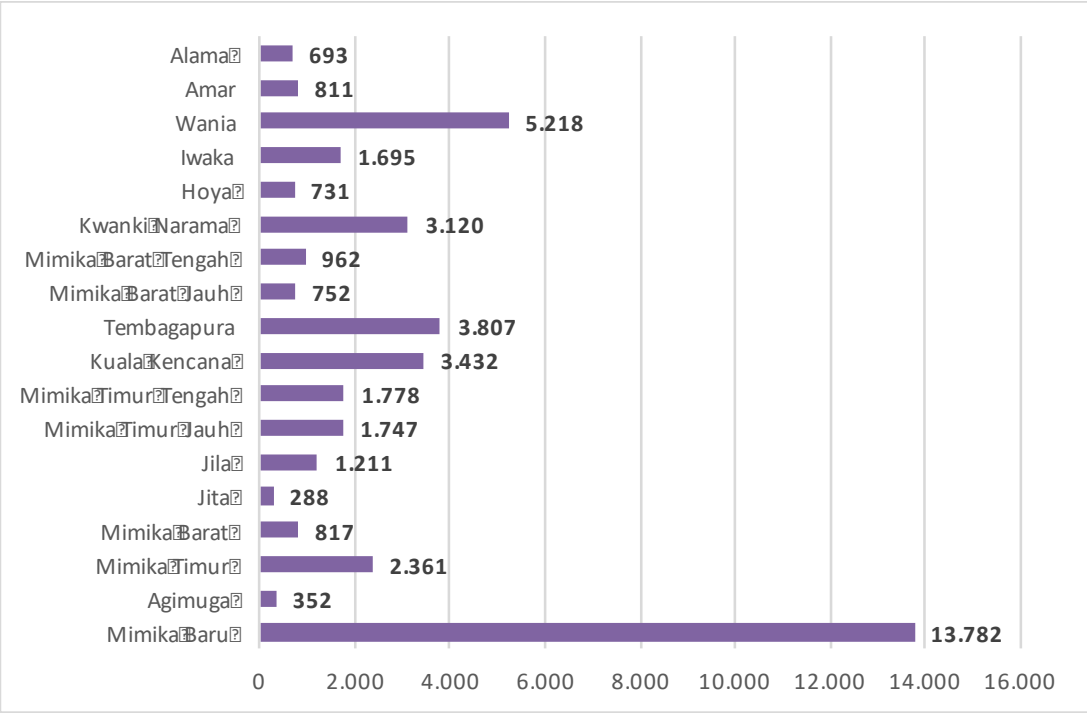
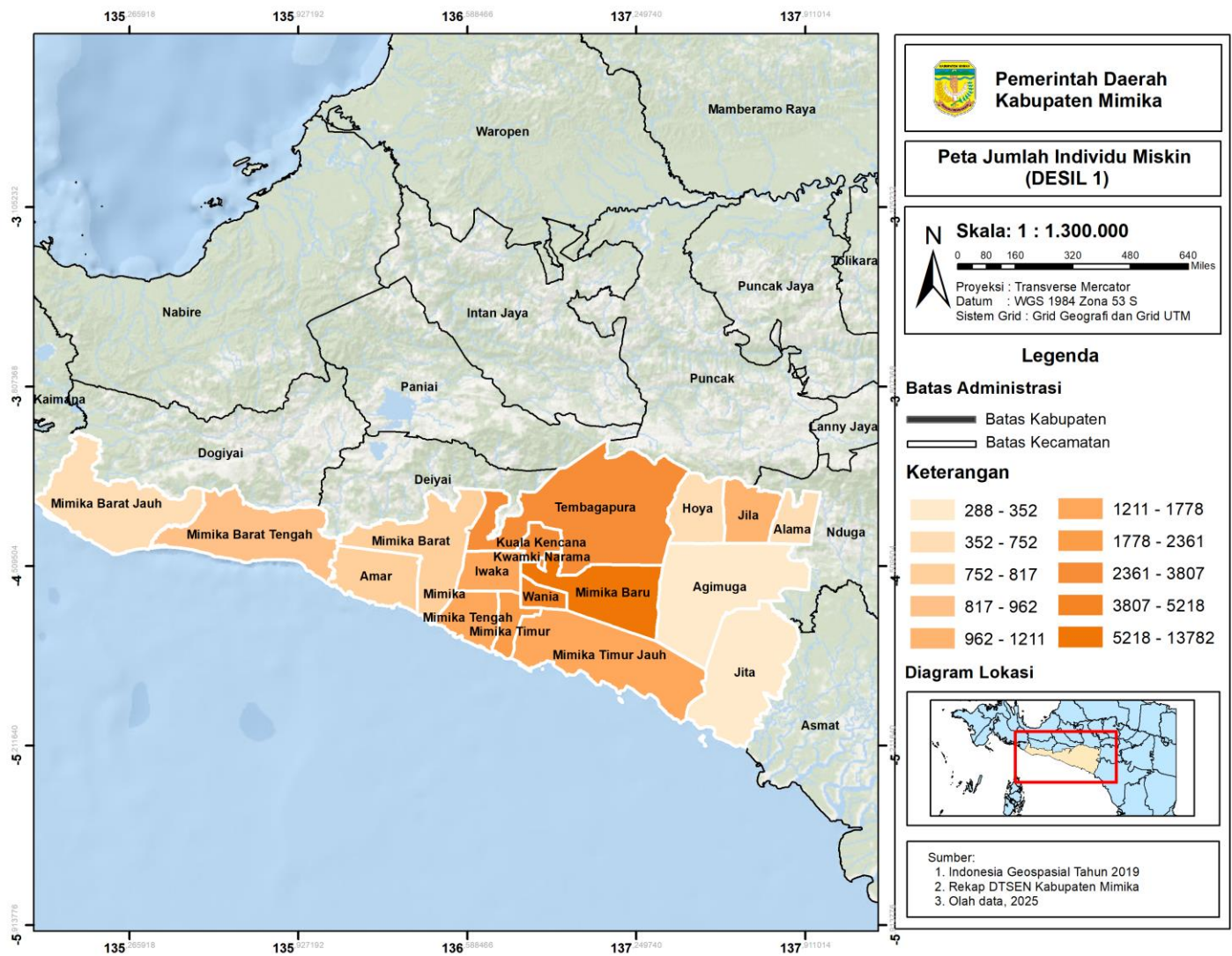


Jumlah keluarga miskin eskترم (desil 1) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **4.453**; Distrik **Wania** sebanyak **1.543**; dan Distrik **Tembagapura** sebanyak **1.083**

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025 (Desil I)

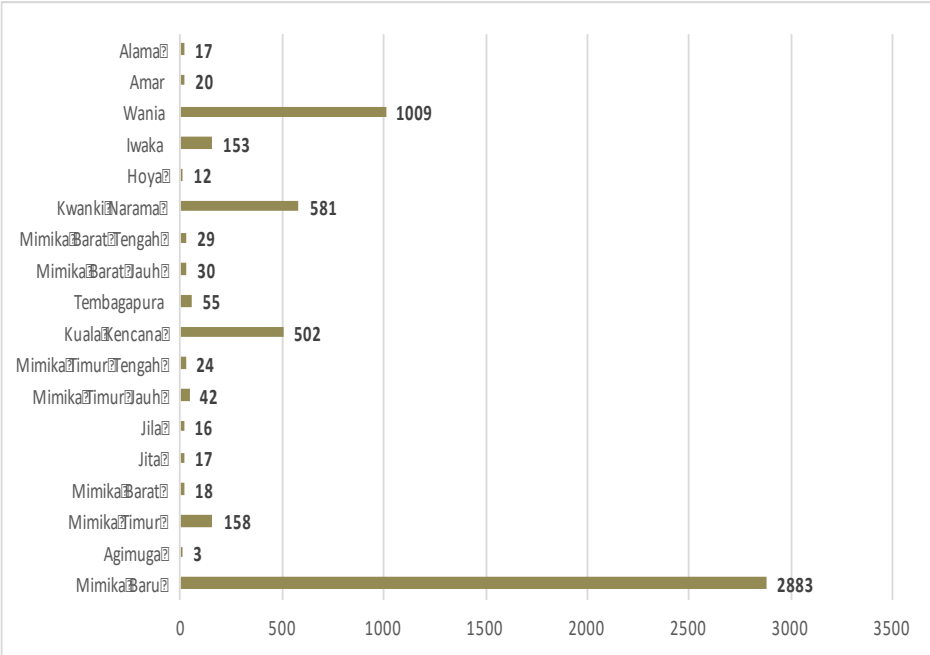
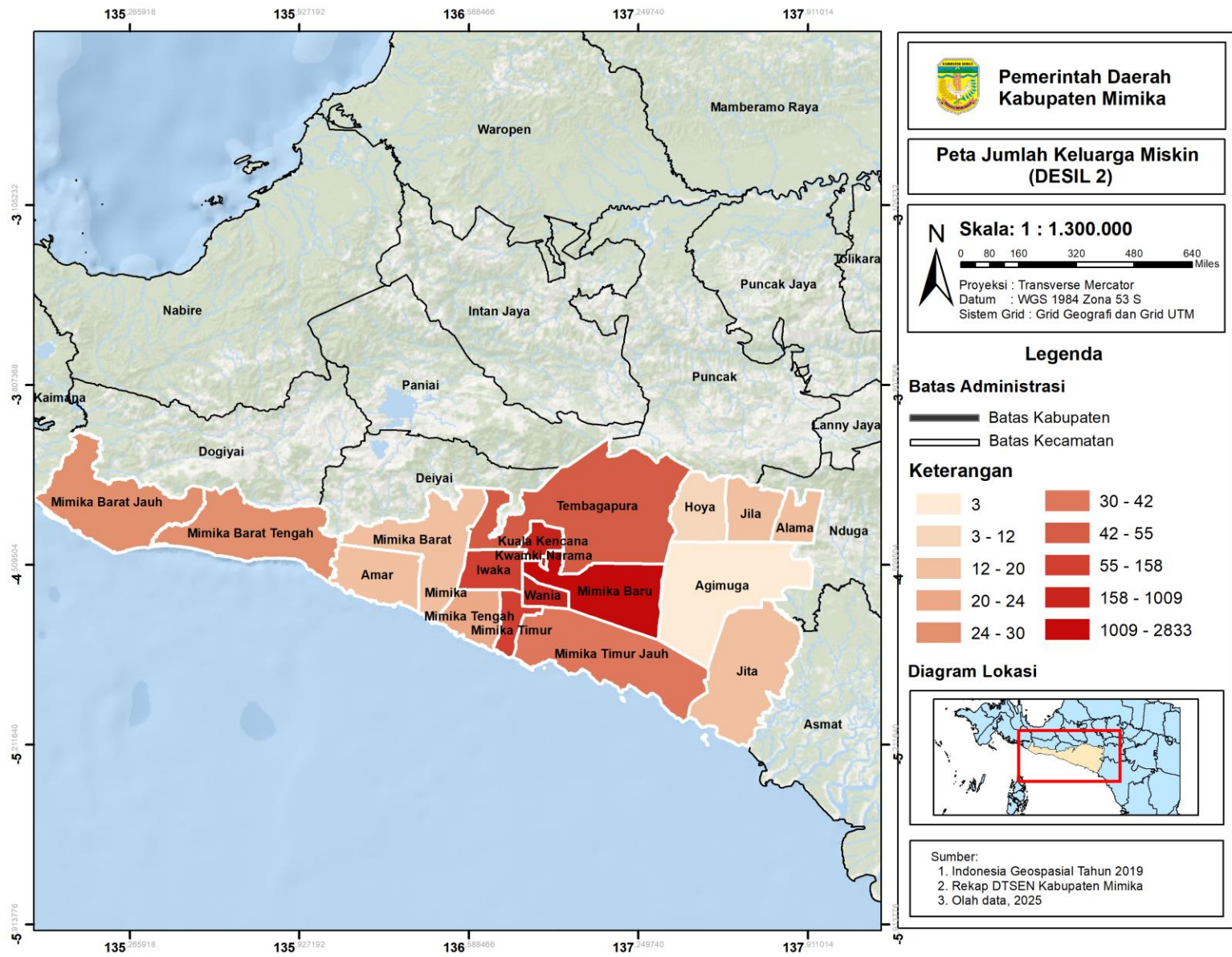


Jumlah individu miskin eskترم (desil 1) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **13.782**; Distrik **Wania** sebanyak **5.218**; dan Distrik **Tembagapura** sebanyak **3.807**

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025 (Desil II)

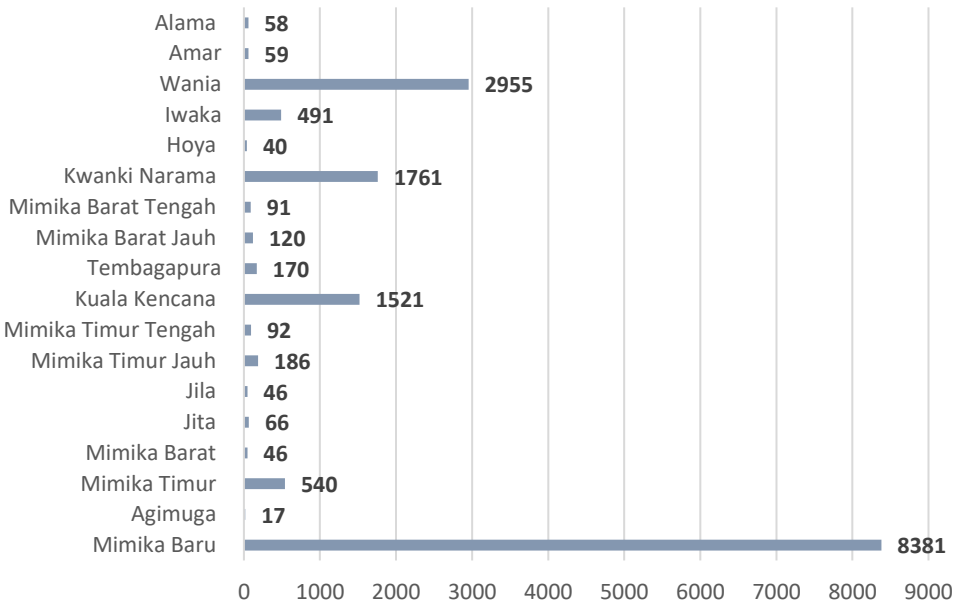
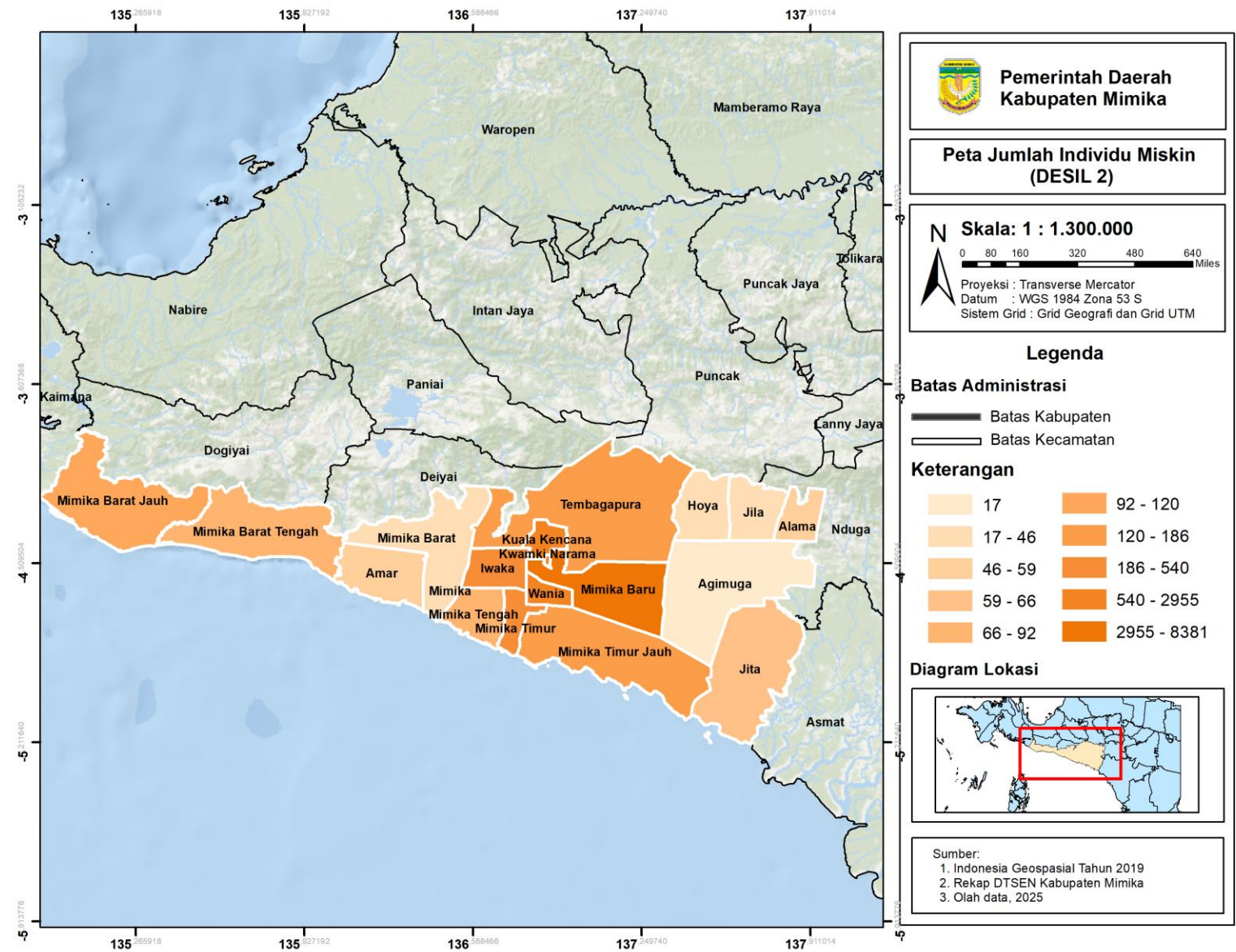


Jumlah keluarga miskin (desil 2) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **2.882**; Distrik **Wania** sebanyak **1.009**; dan Distrik **Kwanki Narama** sebanyak **581**.

*DTSN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025 (Desil II)

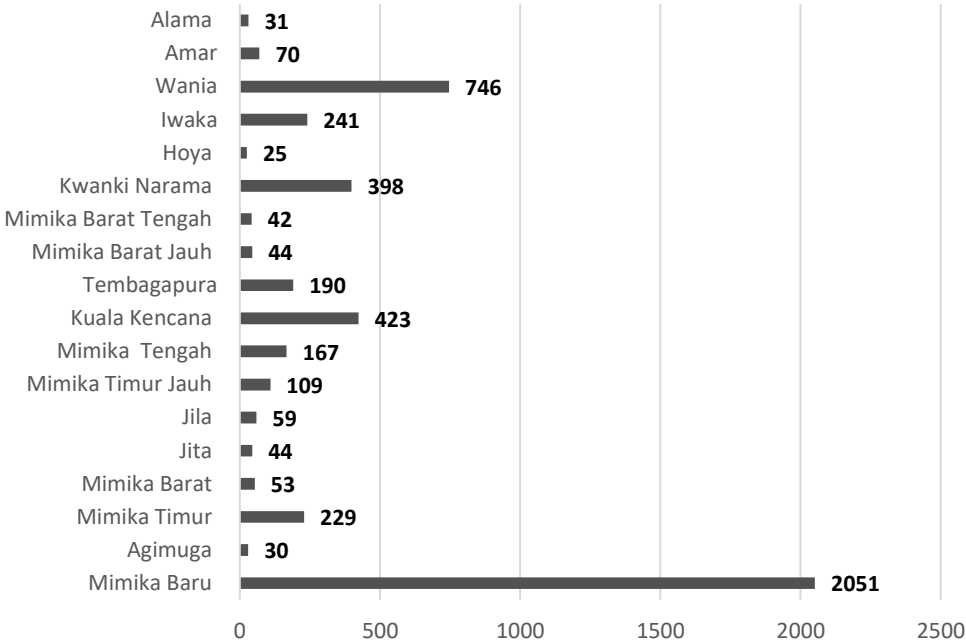
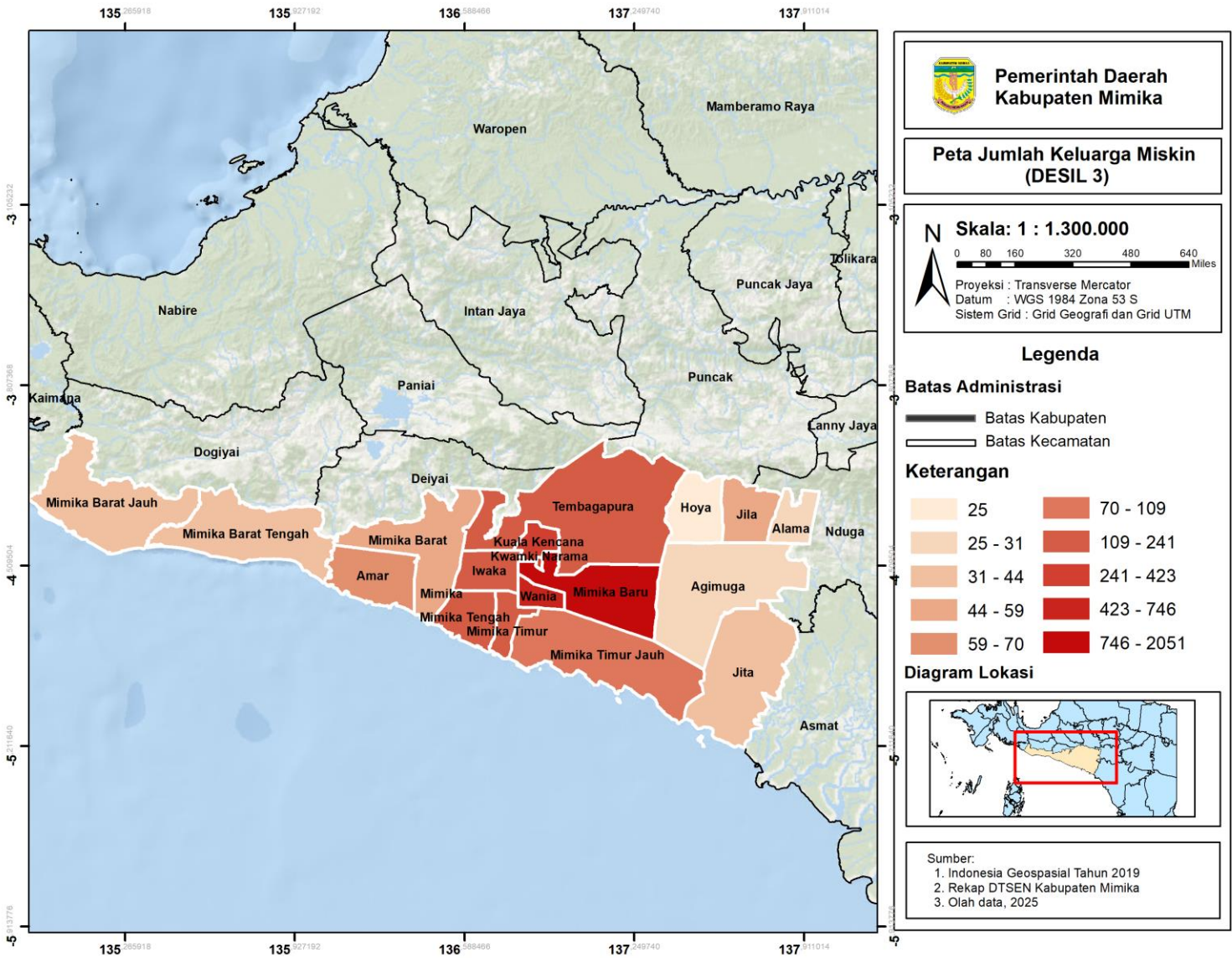


Jumlah individu miskin (desil 2) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **8.381**; Distrik **Wania** sebanyak **2.995**; dan Distrik **Kwanki Narama** sebanyak **1.761**.

*DTSEN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025 (Desil III)



Jumlah keluarga miskin (desil 3) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **2.051**; Distrik **Wania** sebanyak **746**; dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **423**.

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025 (Desil III)



**Pemerintah Daerah  
Kabupaten Mimika**

**Peta Jumlah Individu Miskin  
(DESIL 3)**

**Skala: 1 : 1.300.000**

Proyeksi : Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 53 S  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM

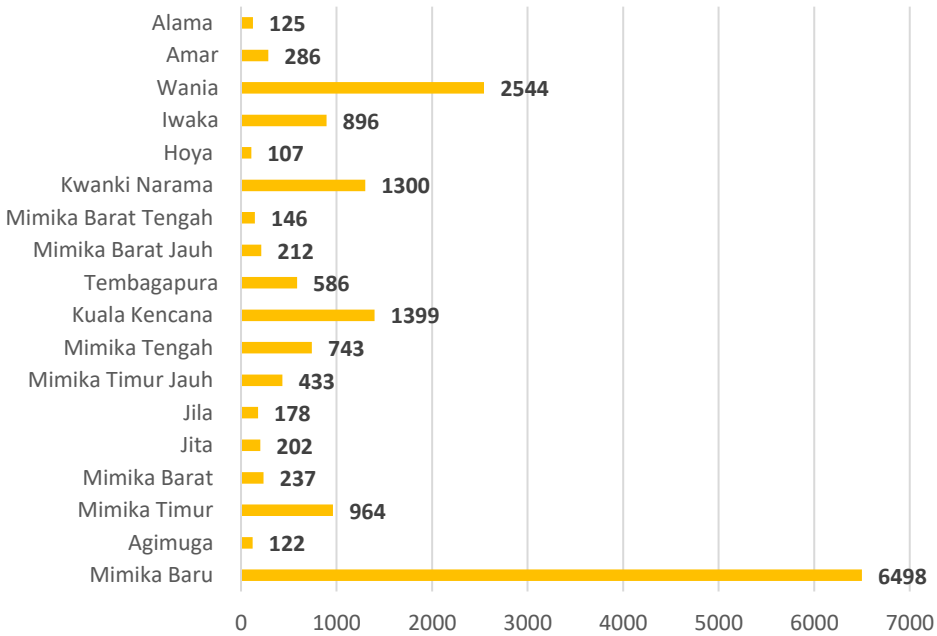
**Legenda**  
**Batas Administrasi**  
— Batas Kabupaten  
— Batas Kecamatan

**Keterangan**

|           |             |
|-----------|-------------|
| 107 - 125 | 586 - 743   |
| 125 - 146 | 743 - 964   |
| 146 - 212 | 964 - 1399  |
| 212 - 286 | 1399 - 2544 |
| 286 - 586 | 2544 - 6498 |

**Diagram Lokasi**

Sumber:  
1. Indonesia Geospasial Tahun 2019  
2. Rekap DTSN Kabupaten Mimika  
3. Olah data, 2025

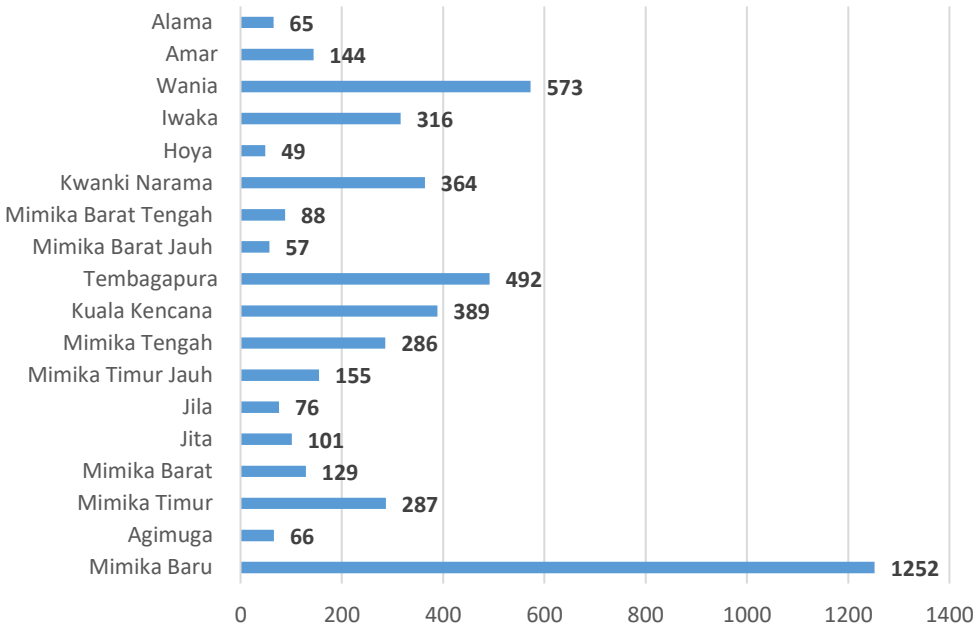
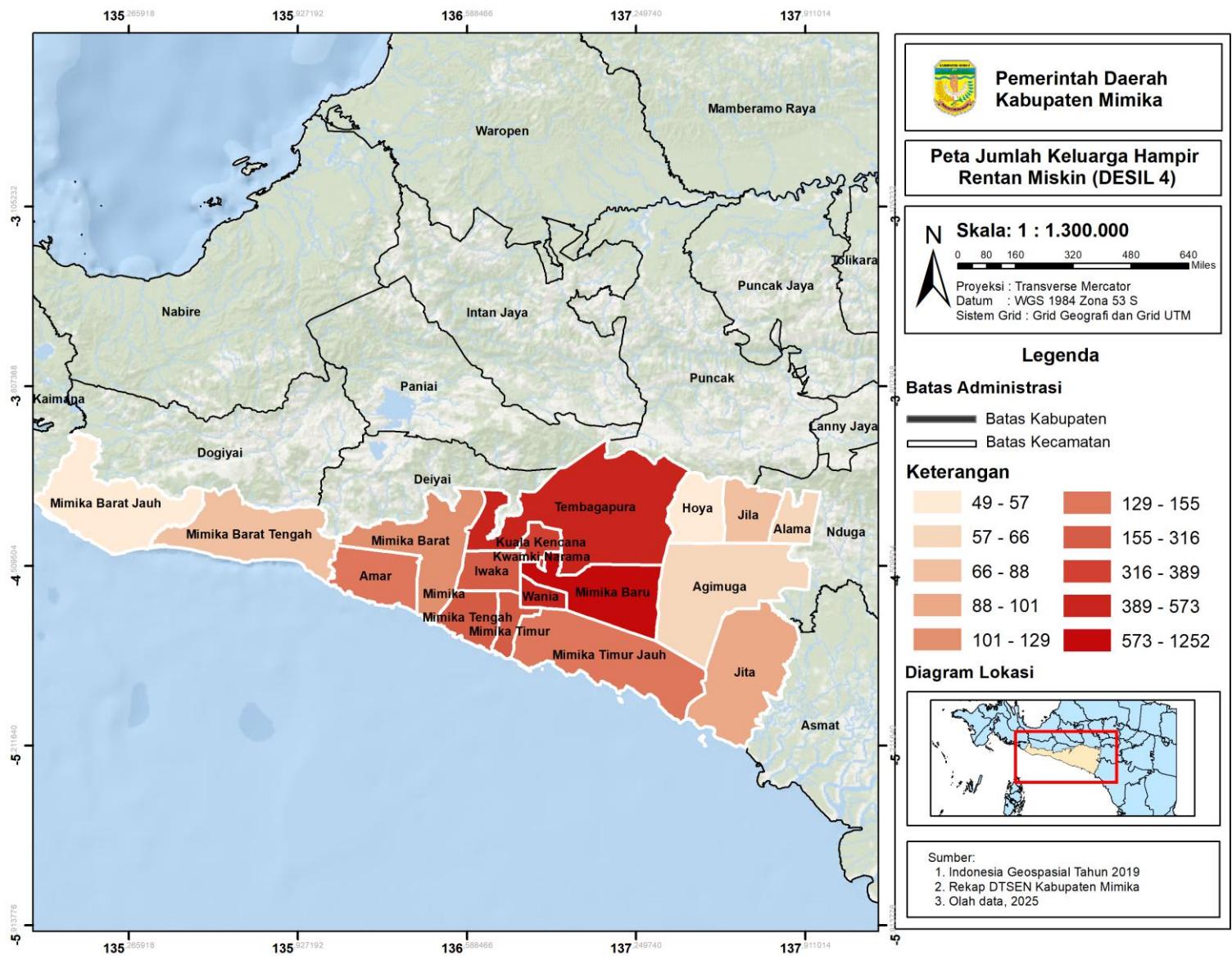


Jumlah individu miskin (desil 3) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **6.498**; Distrik **Wania** sebanyak **2.544**; dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **1.399**.

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025 (Desil IV)

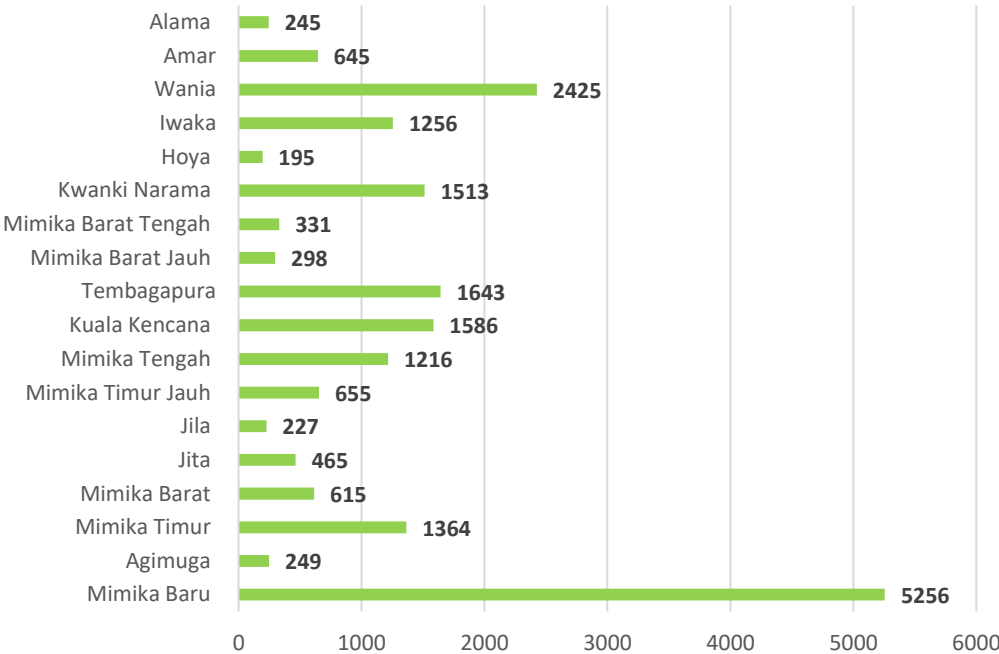
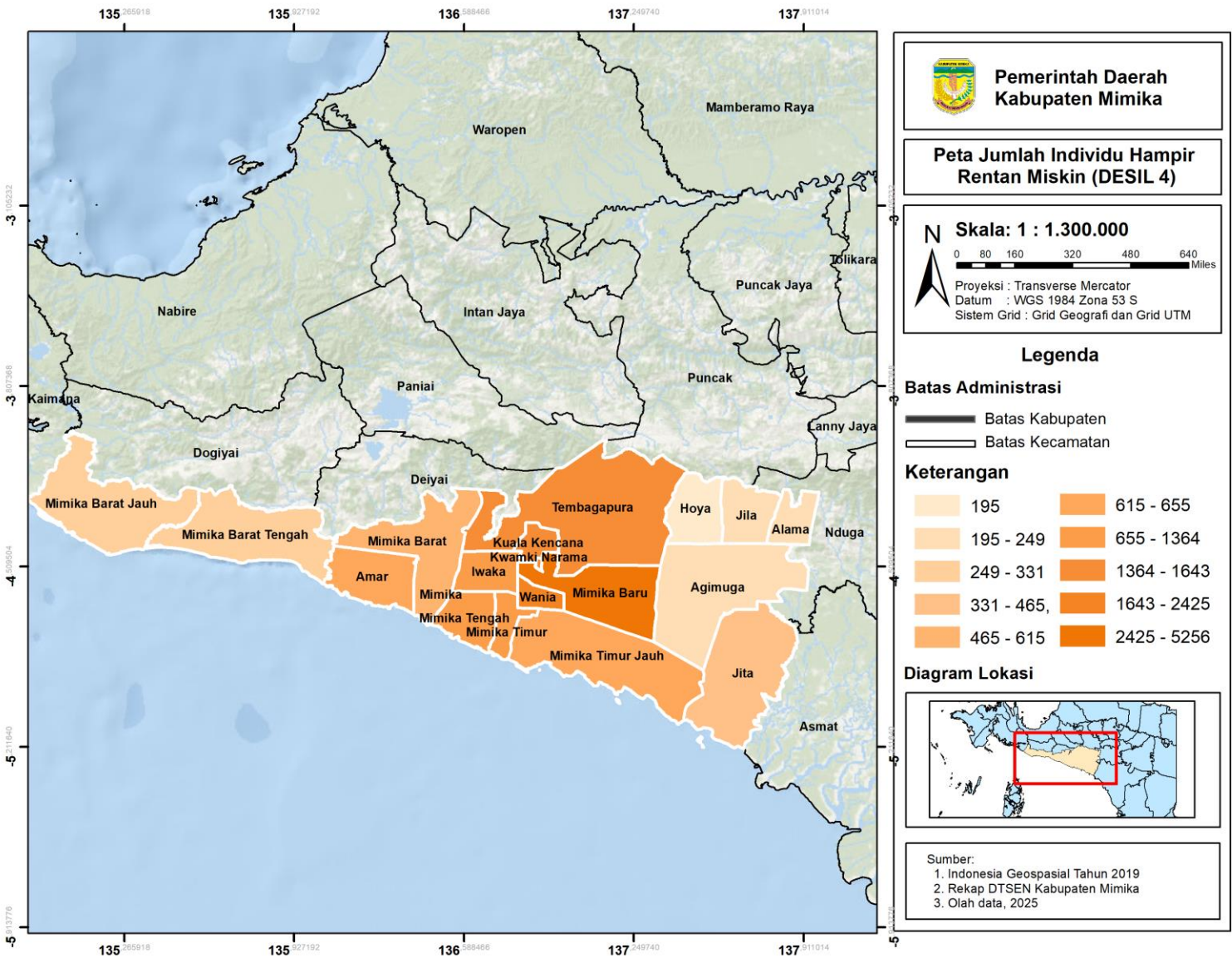


Jumlah keluarga miskin (desil 4) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **1.252**; Distrik **Wania** sebanyak **573**; dan Distrik **Tembagapura** sebanyak **492**

*DTSEN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025 (Desil IV)

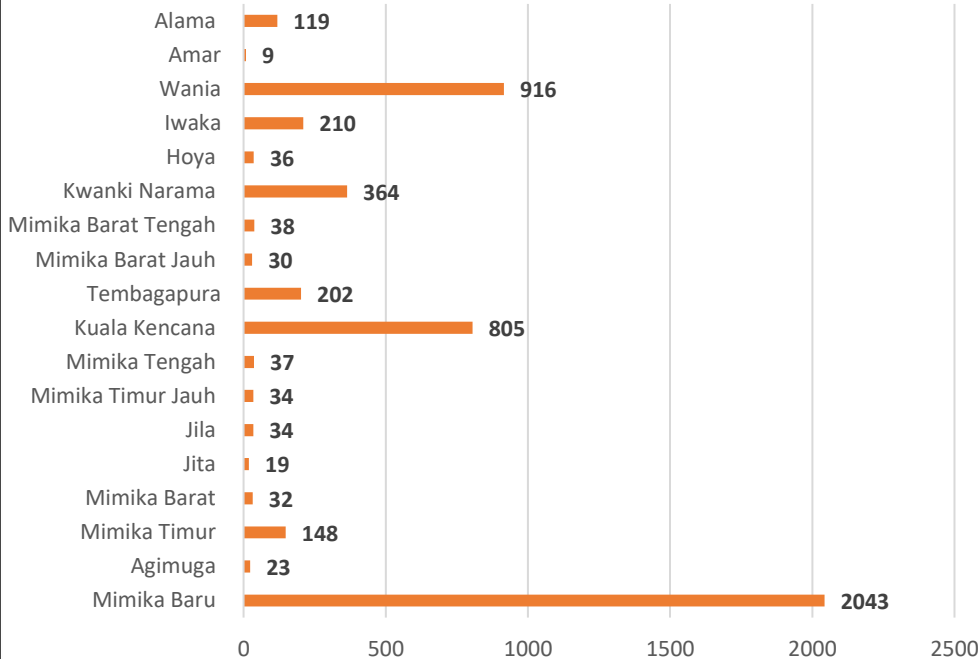
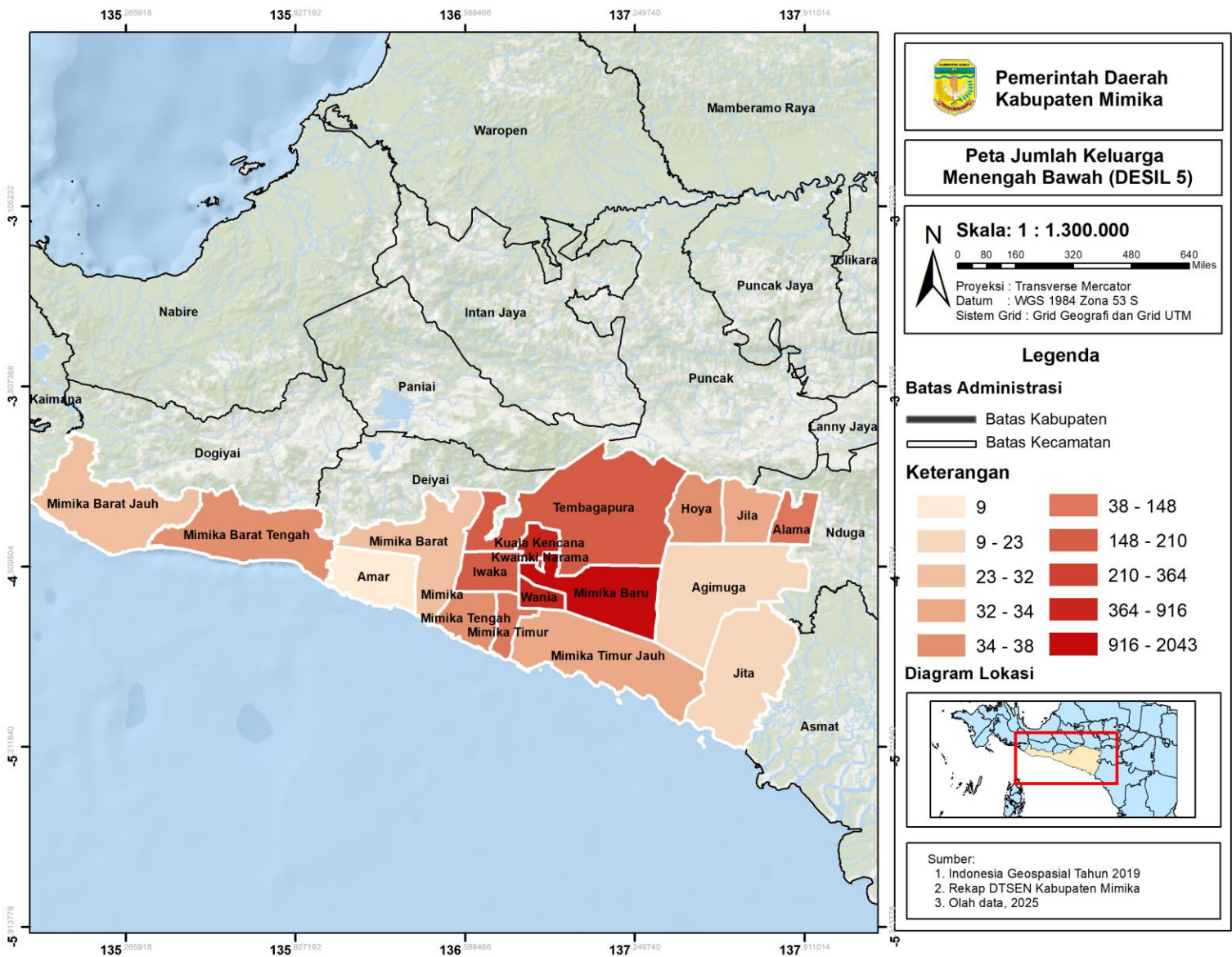


Jumlah individu miskin (desil 4) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **5.256**; Distrik **Wania** sebanyak **2.425**; dan Distrik **Tembagapura** sebanyak **1.643**

*DTSN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Keluarga Miskin 2025 (Desil V)

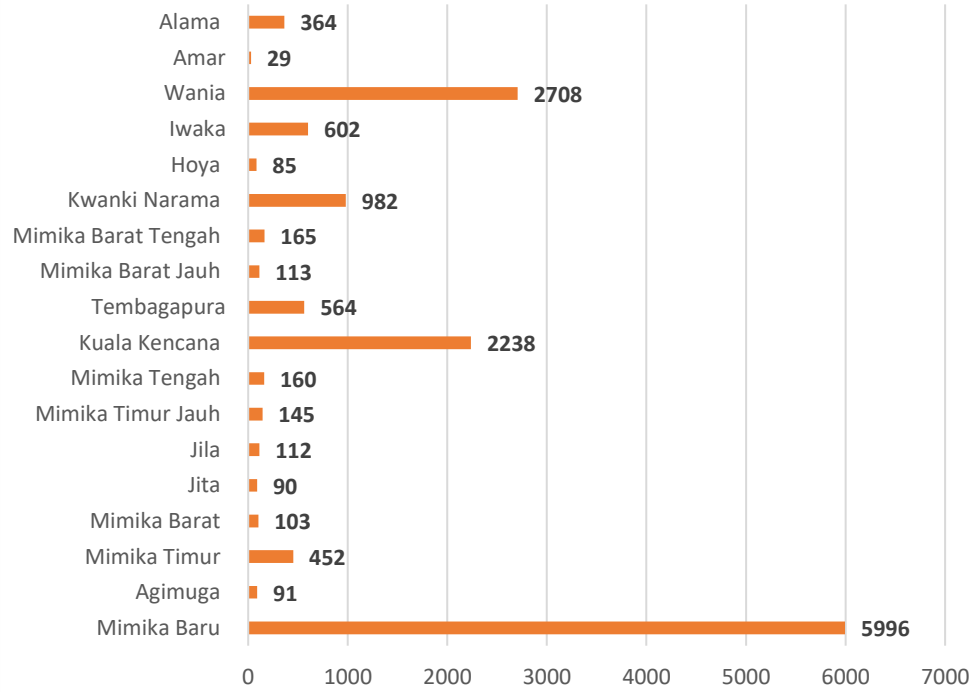
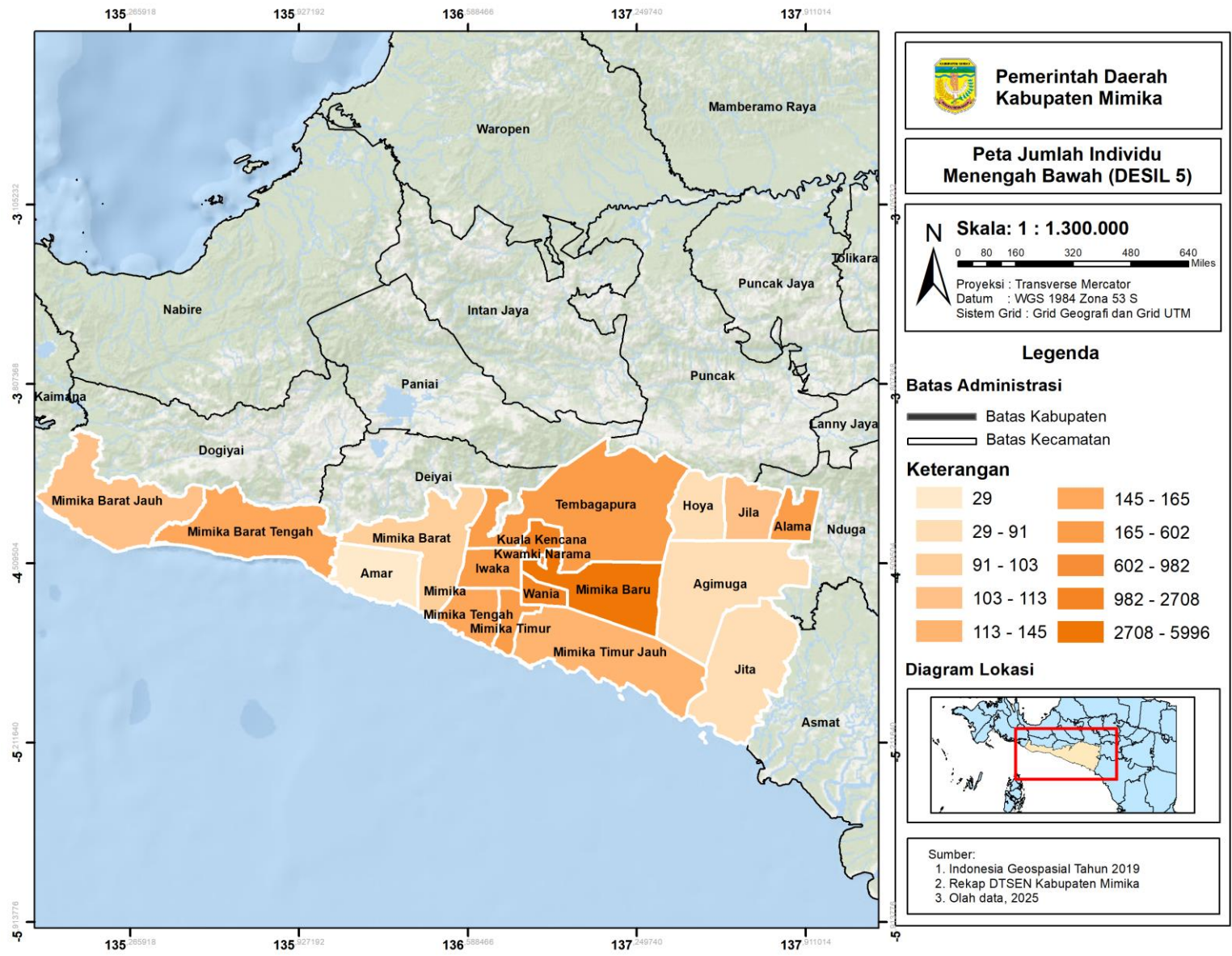


Jumlah keluarga miskin (desil 5) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **2.043**; Distrik **Wania** sebanyak **916** dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **805**

*DTSN Kabupaten Mimika, 2025*

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Jumlah Individu Miskin 2025 (Desil V)

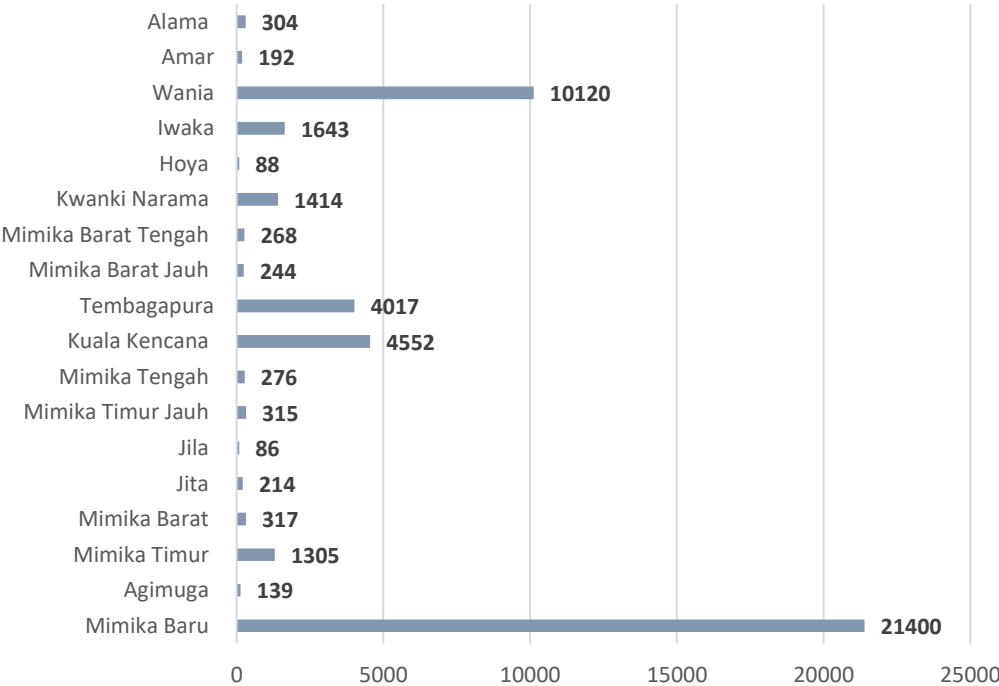
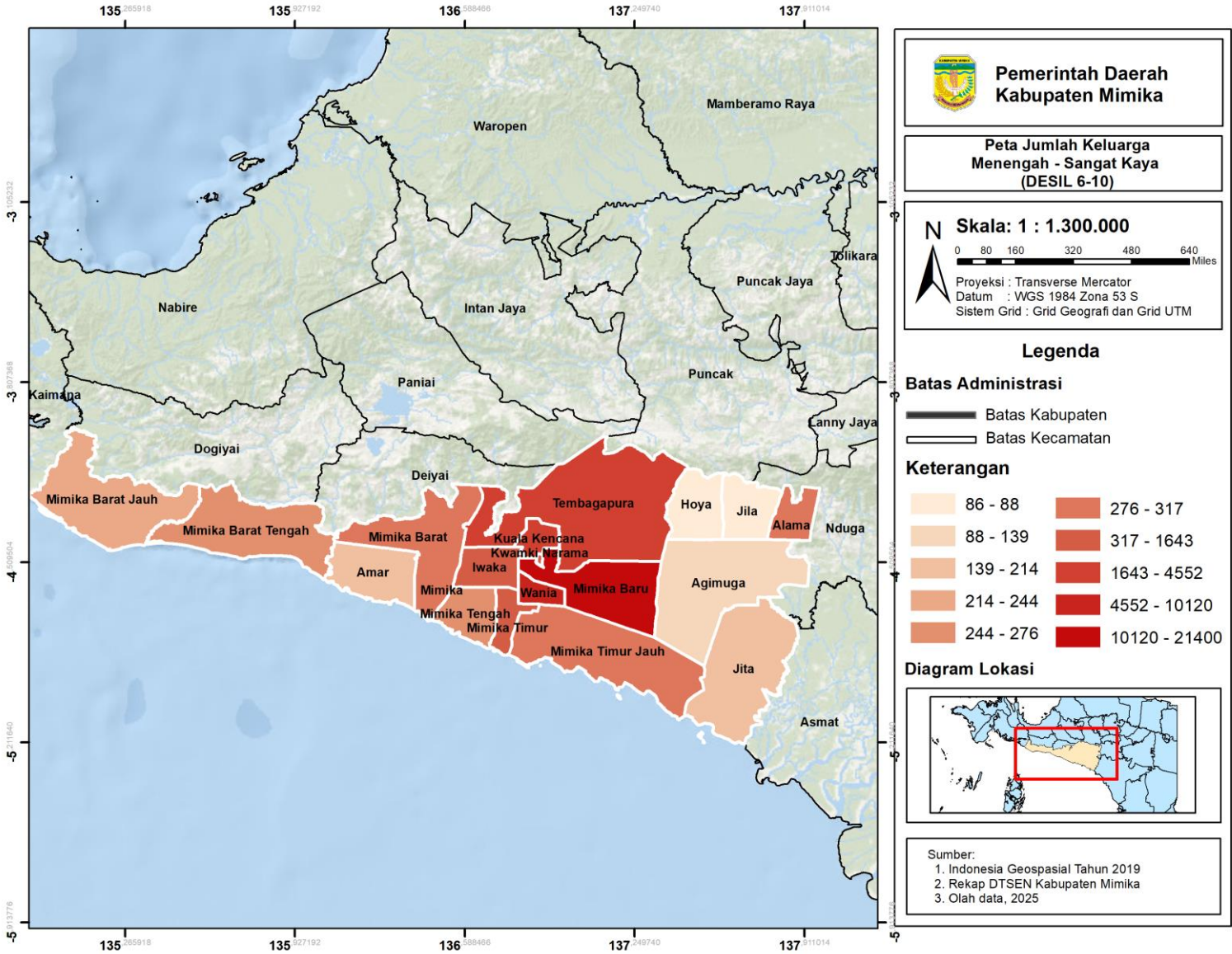


Jumlah individu miskin (desil 5) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **5.996**; Distrik **Wania** sebanyak **2.708** dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **2.238**

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

Jumlah Keluarga Menengah Bawah sampai Sangat Kaya 2025 (Desil VI-X)

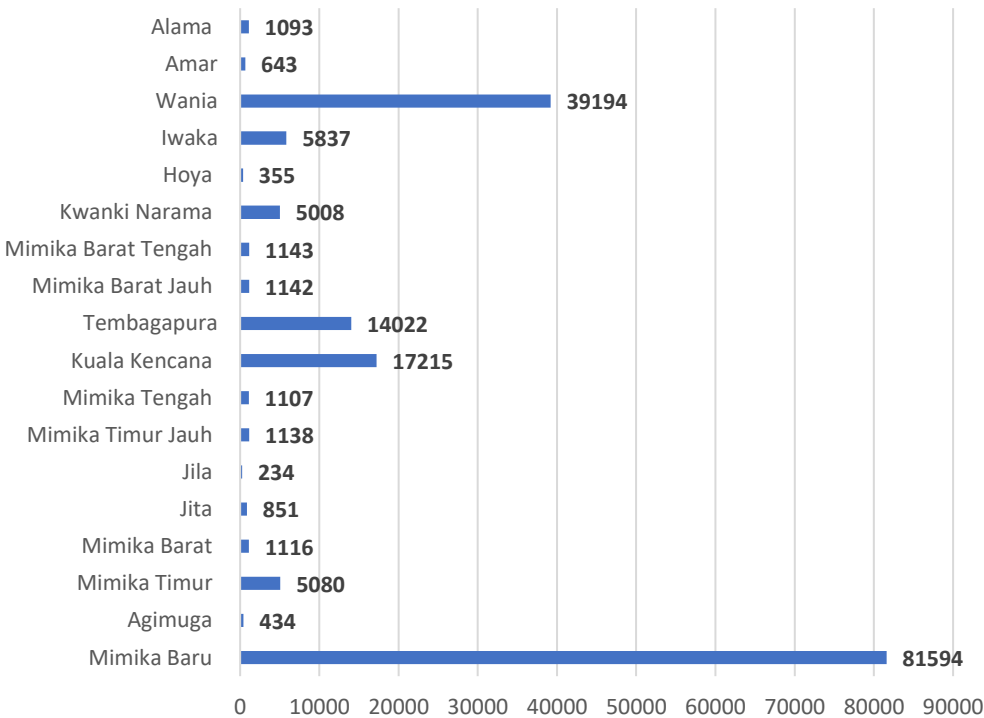
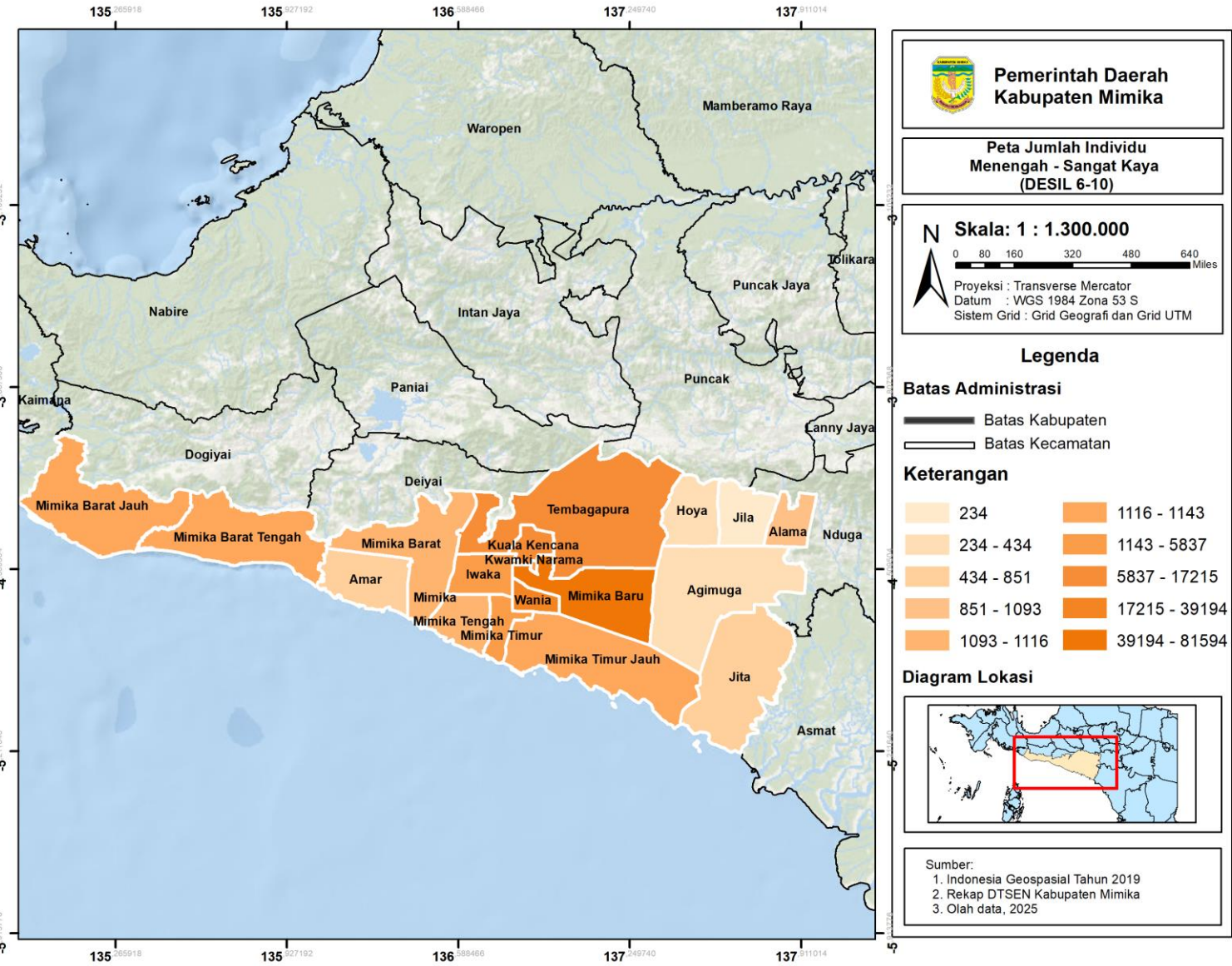


Jumlah keluarga menengah bawah sampai sangat kaya (desil 6-10) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru sebanyak 21.400**; Distrik **Wania sebanyak 10.120** dan Distrik **Kuala Kencana sebanyak 4.552**

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Kabupaten Mimika

Jumlah Individu Menengah Bawah sampai Sangat Kaya 2025 (Desil VI-X)

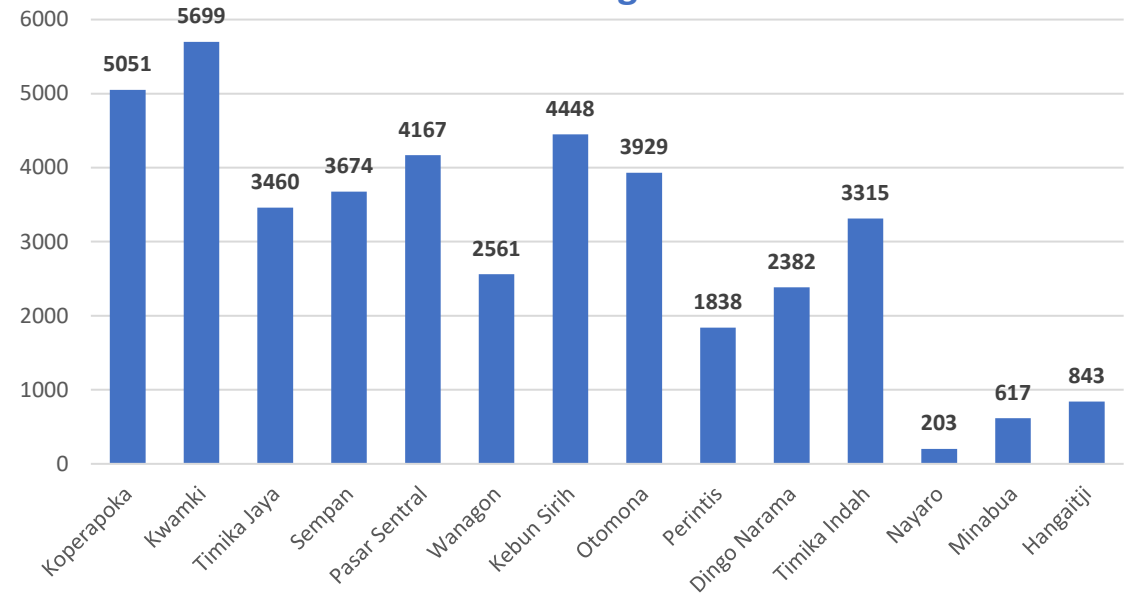


Jumlah individu menengah bawah sampai sangat kaya (desil 6-10) terbanyak terdapat di Distrik **Mimika Baru** sebanyak **81.594**; Distrik **Wania** sebanyak **39.194** dan Distrik **Kuala Kencana** sebanyak **17.215**

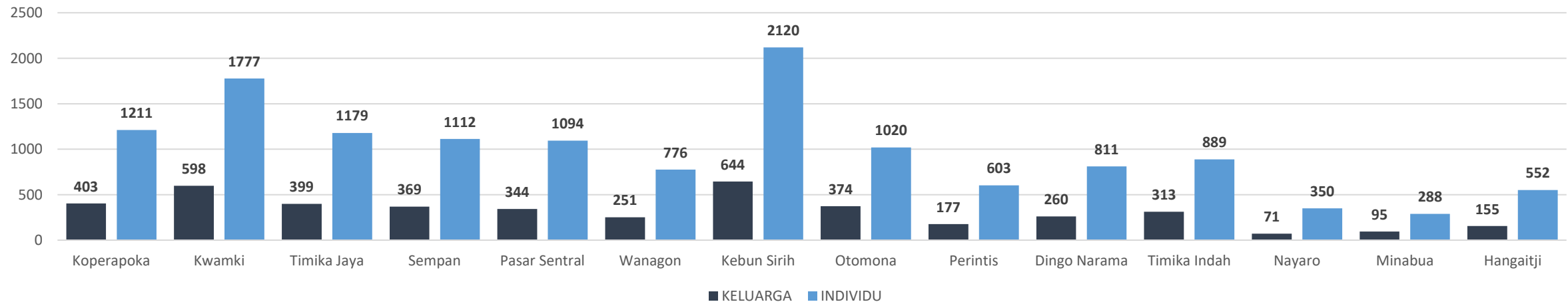
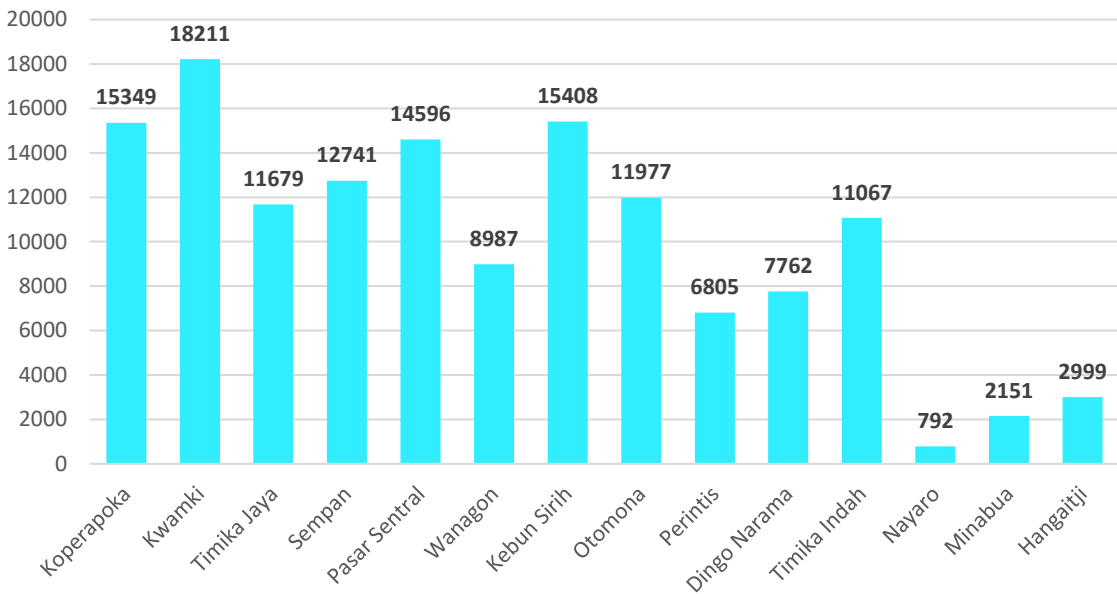
DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Profil Kemiskinan Distrik Mimika Baru 2025

Jumlah Keluarga Miskin



Jumlah Individu Miskin

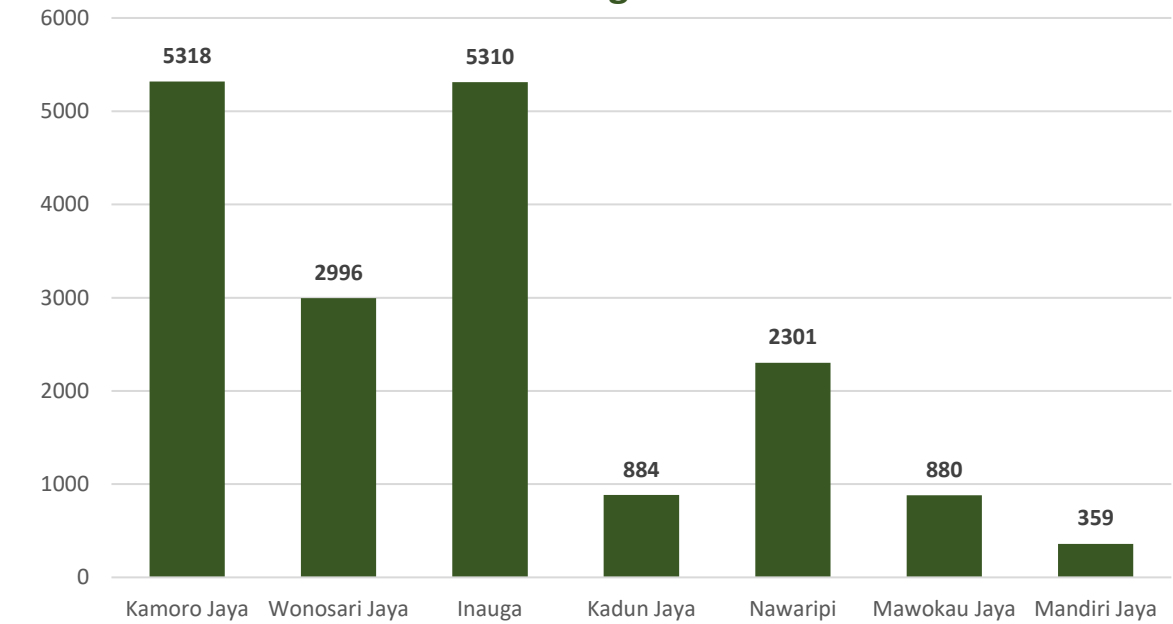


DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

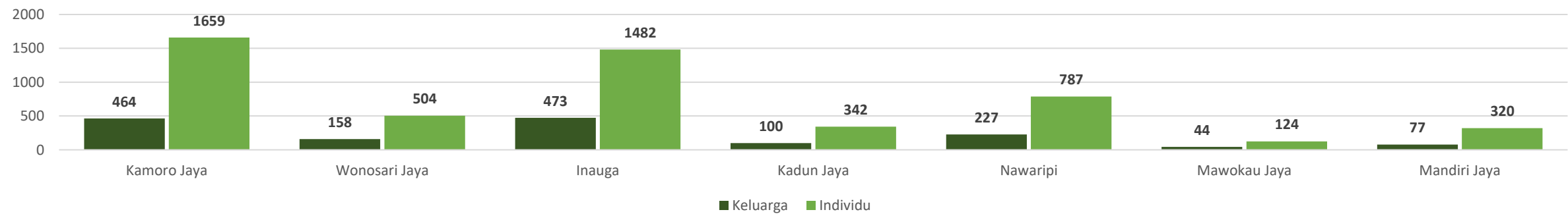
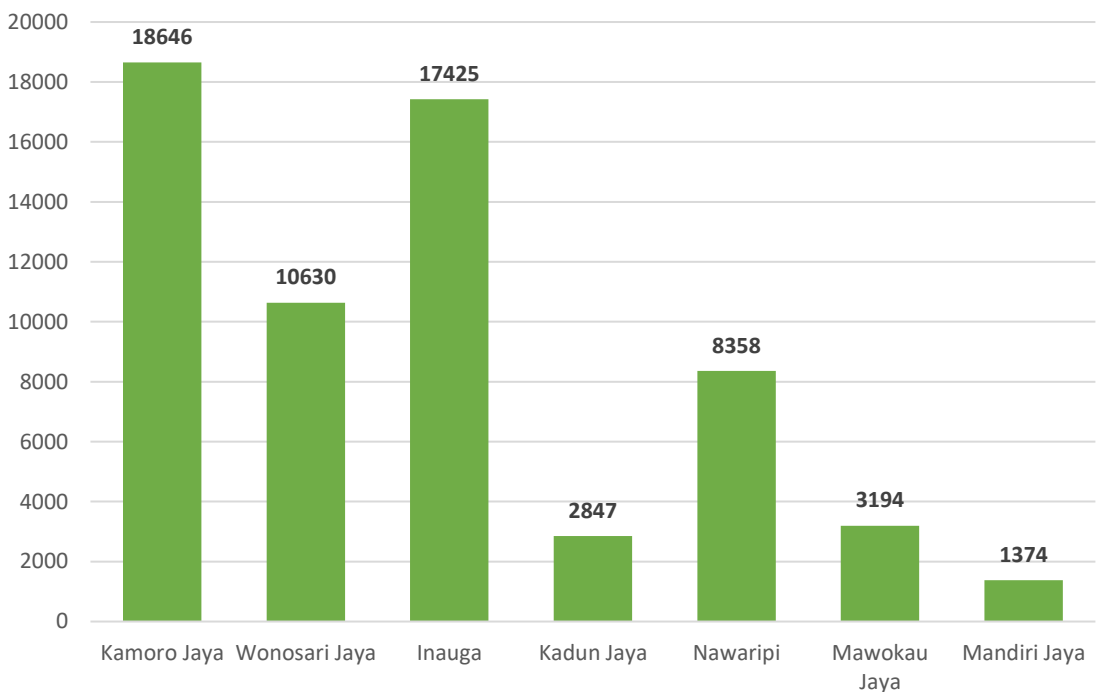
Jumlah Keluarga dan Individu Miskin Ekstrem

# Profil Kemiskinan Distrik Wania 2025

Jumlah Keluarga Miskin



Jumlah Individu Miskin



Jumlah Keluarga dan Individu Miskin Ekstrem

DTSEN Kabupaten Mimika, 2025

# Identifikasi Permasalahan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mimika

## Permasalahan

Data yang tidak sinkron dan valid

*(Terdapat ketidaksesuaian data antar OPD)*

Tinggihnya inflasi dan ketidakstabilan harga

*(Inflasi tahun 2025 sebesar 2,88%)*

Tinggihnya pengangguran terbuka

*(Jumlah Pengangguran tahun 2025 sebanyak 10.258)*

Belum meratanya pusat kegiatan ekonomi

*(64,65% penduduk mimika terdapat di Distrik Mimika Baru )*

Kurangnya inovasi yang terarah dan berkesinambungan

## Dampak

Program tidak tepat sasaran dan kurang efektif

Lemahnya daya beli dan perlambatan penurunan kemiskinan

Meningkatnya jumlah dan persentase penduduk miskin usia produktif

Terpusatnta kegiatan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata

Belum optimalnya pemanfaatan peluang dan potensi lokal

# Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

|                                                                                                          | Kekuatan | Kelemahan | Peluang | Tantangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|
| Adanya dana otonomi khusus                                                                               | ✓        |           |         |           |
| Adanya dana tanggung jawab sosial perusahaan                                                             | ✓        |           |         |           |
| Potensi sumber daya alam                                                                                 | ✓        |           |         |           |
| Kontinuitas pembangunan infrastruktur dasar yang terstandar serta mudah diakses                          | ✓        |           |         |           |
| Keterbatasan kualitas SDM dan akses terhadap pendidikan dasar                                            |          | ✓         |         |           |
| Ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian                                                   |          | ✓         |         |           |
| Data kemiskinan yang belum valid dan up to date                                                          |          | ✓         |         |           |
| Adanya komitmen pemerintah pusat melalui berbagai skema dan program akselerasi penanggulangan kemiskinan |          |           | ✓       |           |
| Adanya berbagai NGO internasional yang memiliki isu advokasi kemiskinan dan ketimpangan                  |          |           | ✓       |           |
| Perkembangan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi                                          |          |           | ✓       |           |
| Potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan perikanan                                                    |          |           | ✓       |           |
| Kondisi geografis yang sulit dijangkau                                                                   |          |           |         | ✓         |
| Potensi konflik                                                                                          |          |           |         | ✓         |
| Krisis ekonomi global                                                                                    |          |           |         | ✓         |
| Geopolitik                                                                                               |          |           |         | ✓         |
| Migrasi penduduk                                                                                         |          |           |         | ✓         |
| Belum meratanya pembangunan antar distrik                                                                |          |           |         | ✓         |

# Analisis SWOT

## S



### STRENGTHS

- Adanya dana otonomi khusus
- Adanya dana tanggung jawab sosial perusahaan
- Potensi sumber daya alam
- Kontinuitas pembangunan infrastruktur dasar yang terstandar serta mudah diakses

## W



### WEAKNESSES

- Keterbatasan kualitas SDM dan akses terhadap pendidikan dasar
- Ketergantungan pada sektor pertambangan dan penggalian
- Data kemiskinan yang belum valid dan update

## O



### OPPORTUNITIES

- Adanya komitmen pemerintah pusat melalui berbagai skema dan program akselerasi penanggulangan kemiskinan
- Adanya berbagai NGO internasional yang memiliki isu advokasi kemiskinan dan ketimpangan
- Perkembangan teknologi digital dan infrastruktur telekomunikasi
- Potensi hilirisasi komoditas perkebunan dan perikanan

## T



### THREATS

- Kondisi geografis yang sulit dijangkau
- Potensi konflik
- Krisis ekonomi global
- Migrasi penduduk
- Belum meratanya pembangunan antar distrik

## SO (Strengths + Opportunities)

Pengoptimalan pemanfaatan dana Otsus dan CSR Perusahaan dalam pengembangan UMKM lokal berbasis komunitas.

## WO (Weaknesses + Opportunities)

Penguatan sinergitas dengan berbagai program nasional dan NGO dalam percepatan penurunan kemiskinan ekstrem

## ST (Strengths + Threats)

Penguatan resolusi konflik berbasis pendekatan kebudayaan

Pengaturan migrasi dan persebaran penduduk

## WT (Weaknesses + Threats)

Perbaikan pendataan dan tata kelola pemerintahan

# Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan





## Integrasi Bantuan Sosial

- Memanfaatkan dan memutakhirkan **Data Terpadu Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN)** untuk meningkatkan akurasi dan kovergensi program.
- Mengintegrasikan program bantuan sosial daerah guna meningkatkan cakupan dan efektivitas program.



## Kepesertaan dan Pendampingan Terintegrasi

- Memperkuat sistem rujukan untuk penanganan<sup>2</sup> keluhan dan pengaduan.
- Mengoptimalkan peran pendamping dalam<sup>2</sup> meningkatkan kemandirian penerima bantuan.



## Implementasi Perlindungan Sosial Adaptif

- Mengembangkan<sup>2</sup> program perlindungan sosial berbasis risiko.
- Memperkuat program bantuan sosial berbasis komunitas.



## Digitalisasi Penyaluran

- Menyediakan infrastruktur digital untuk penyaluran bantuan.
- Meningkatkan literasi digital SDM pengelola di daerah.



## Graduasi dan Integrasi Program Pemberdayaan Ekonomi

- Mendorong graduasi penerima manfaat yang sudah tidak layak.
- Melakukan rujukan program pemberdayaan ekonomi bagi penduduk yang telah graduasi.



- Penyediaan fasilitas perizinan dan legalitas usaha.
- Penyediaan akses fasilitas permodalan usaha.
- Pelatihan dan Pendampingan.



## Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah

- Pengelolaan SDA dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
- Promosi produk unggulan daerah.
- Peningkatan infrastruktur ekonomi.



- Kolaborasi lintas sektor dengan *stakeholders*.
- Penguatan literasi digital.
- Penyediaan infrastruktur teknologi.



## Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia

- Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Program padat karya dan pemberdayaan masyarakat.
- Fasilitasi penempatan tenaga kerja.



## Peningkatan Akses dan Kualitas Fasilitas Pendidikan serta Kesehatan

- Mengalokasikan anggaran daerah untuk pembangunan dan pemeliharaan sekolah serta fasilitas kesehatan.
- Memperkuat program beasiswa, pelatihan tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan.



## Penguatan Infrastruktur Digital dan Energi untuk Ekonomi Inklusif

- Mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah terpencil untuk mendukung pendidikan dan ekonomi digital.
- Mengembangkan akses listrik dan energi terbarukan guna meningkatkan daya saing ekonomi lokal.



## Pembangunan dan Perbaikan Rumah Layak Huni

- Mengintegrasikan program bantuan perumahan dengan skema subsidi dan dana daerah.
- Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga sosial dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.



## Peningkatan Produktivitas Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

- Meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian, pupuk bersubsidi, dan irigasi.
- Mengembangkan pasar hasil pertanian melalui kemitraan dengan koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.



*Terima Kasih*

